



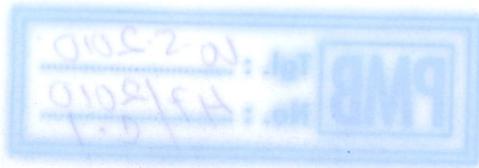
PERKEMBANGAN
PENDAPATAN MASYARAKAT
DI LOKASI COREMAP II
PULAU ABANG, KOTA BATAM

PERKEMBANGAN
PENDAPATAN MASYARAKAT
DI LOKASI COREMAP II
PULAU ABANG, KOTA BATAM



Oleh:

MITA NOVERIA
MEIRINA AYUMI MALAMASSAM



COREMAP-LIPI

Coral Reef Rehabilitation and Management Program
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(COREMAP II – LIPI)
Jakarta, 2009



LIPI

© 2010 Indonesian Institute of Sciences (LIPI)

Pusat Penelitian Kependudukan bekerja sama dengan COREMAP*

Katalog dalam Terbitan

Perkembangan Pendapatan Masyarakat di Lokasi COREMAP II,
Pulau Abang, Kota Batam/Mita Noveria, Meirina Ayumi
Malamassam– Jakarta: 2010.

xvi + 80 hlm.; 14,8 x 21 cm

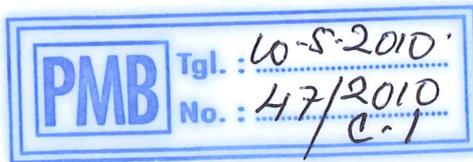
ISBN 978-602-8717-41-0

1. Sumber Daya Laut – Kondisi Sosial Ekonomi

333. 911



*Pusat Penelitian Kependudukan - LIPI
Gedung Widya Graha Lt. X, Jl. Gatot Subroto 10
Jakarta Selatan, 12710
Telp.: (021) 5221687, 5251542 Psw. 720
Telp.: (021) 5207205, 5221687
E-mail: ppk-lipi@rad.net.id



KATA PENGANTAR

Pelaksanaan COREMAP fase II di beberapa lokasi di Indonesia Bagian Barat telah berjalan kurang lebih lima tahun. Selama kurun waktu pelaksanaan COREMAP tersebut, berbagai program dan kegiatan berkaitan dengan penyadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan terumbu karang, pengelolaan berbasis masyarakat dan pengawasan telah dilakukan.

Untuk melihat keberhasilan COREMAP dari aspek sosial – ekonomi, dilakukan kajian BME sosial - ekonomi. Kajian ini dilakukan pada awal, tengah dan akhir program. Kajian pada awal dan tengah program telah dilakukan pada tahun 2005 dan 2007. Kajian sosial – ekonomi tahun 2005 (T0) bertujuan untuk melihat kondisi sosial – ekonomi masyarakat sebelum program dan kegiatan COREMAP dilakukan. Sedangkan kajian BME sosial – ekonomi pada tahun 2007 (T1) bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan COREMAP di daerah dan mengumpulkan data mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya tingkat pendapatan, untuk memantau dampak program COREMAP terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Kajian BME sosial – ekonomi pada tahun 2009 dilakukan untuk mengkaji capaian pelaksanaan COREMAP, khususnya perubahan pendapatan masyarakat yang dikaitkan dengan kegiatan mata pencaharian alternatif (MPA).

Buku ini merupakan hasil dari kajian BME sosial-ekonomi (T2) yang dilakukan pada tahun 2009 di lokasi-lokasi COREMAP di Indonesia Bagian Barat. BME sosial-ekonomi ini dilakukan oleh CRITC-LIPI bekerjasama dengan tim peneliti dari Pusat Penelitian Kependudukan - LIPI (PPK-LIPI) dan beberapa peneliti sosial dari kedeputian IPSK - LIPI.

Terlaksananya kegiatan penelitian dan penulisan buku ini melibatkan berbagai pihak. Penghargaan dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Pusat Penelitian Kependudukan – LIPI yang telah memberikan dukungan kepada tim peneliti melakukan studi ini. Kepada para informan yang terdiri atas masyarakat nelayan, ketua dan pengurus LPSTK dan POKMAS, pemimpin formal dan informal, tokoh masyarakat di lokasi Pulau Abang, Kota Batam, kami ucapkan terima kasih atas segala bantuannya. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para pewawancara yang telah membantu pelaksanaan survai. Kami juga memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua narasumber dari berbagai unsur pengelola COREMAP di tingkat kabupaten: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Batam, CRITC Pulau Abang dan berbagai pihak yang ada di daerah yang telah membantu memberikan data dan informasi.

Jakarta, Desember 2009
Direktur NPIU CRITC COREMAP II-LIPI

Susetiono

RANGKUMAN

Coremap, program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang, diluncurkan dengan beberapa tujuan, baik untuk kepentingan ekologi maupun sosial ekonomi masyarakat yang hidup di wilayah pesisir dan kepulauan. Dari aspek sosial ekonomi, salah satu tujuan yang hendak dicapai Coremap adalah menurunkan angka kemiskinan di antara masyarakat pesisir. Untuk mencapai tujuan tersebut Coremap telah melaksanakan berbagai kegiatan, baik yang secara langsung maupun tidak langsung bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan. Kegiatan yang secara langsung berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan adalah menciptakan dan mengembangkan mata pencaharian alternatif (MPA).

Selama ini mayoritas masyarakat di lokasi Coremap, termasuk di Kelurahan Pulau Abang mempunyai pendapatan dengan sumber utama dari kegiatan kenelayanan. Dapat dikatakan bahwa kegiatan ekonomi mereka sangat tergantung pada sumber daya laut. Mengingat kegiatan kenelayanan sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang pada waktu-waktu tertentu, terutama ketika gelombang kuat, menghambat nelayan turun ke laut, maka pendapatan nelayan juga berfluktuasi menurut kondisi cuaca. Oleh karena itu, kegiatan penciptaan dan pengembangan MPA penting dilakukan agar penduduk bisa memperoleh pendapatan (secara tetap) tanpa terpengaruh oleh kondisi cuaca. Hal ini memungkinkan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya dapat menurunkan angka kemiskinan. Selain itu, kegiatan MPA juga merupakan salah satu upaya untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada sumber daya laut yang berpotensi menimbulkan kerusakan karena adanya kecenderungan eksploitasi yang berlebihan dan dilakukan secara terus menerus dalam waktu yang lama.

Seperti program-program pembangunan pada umumnya, capaian program Coremap juga perlu dikaji, terutama untuk mengetahui dampak program tersebut terhadap kehidupan masyarakat di lokasinya. Salah satu upaya untuk itu adalah melakukan penelitian dengan fokus pada isu-isu yang akan dikaji. Terkait dengan capaian sosial ekonomi Coremap, salah satu indikator untuk melihat keberhasilan program adalah peningkatan pendapatan masyarakat. Untuk itu, perlu dilakukan perbandingan antara pendapatan masyarakat sebelum Coremap dilaksanakan dan setelah kegiatan program tersebut berjalan.

Penelitian ini merupakan penelitian ketiga yang dilakukan di Kelurahan Pulau Abang, salah satu dari tiga kelurahan lokasi Coremap di Kecamatan Galang, Kota Batam. Dua penelitian sebelumnya dilaksanakan pada tahun 2005 (T0 – sebelum Coremap dilaksanakan) dan 2007 (T1 – setelah kegiatan program pengelolaan terumbu karang tersebut dilaksanakan selama dua tahun). Penelitian ketiga ini (T2) bertujuan untuk mengkaji capaian pelaksanaan Coremap, khususnya perubahan pendapatan masyarakat yang dikaitkan dengan kegiatan MPA. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah mengkaji jenis kegiatan MPA dan permasalahan dalam pelaksanaannya, menggambarkan perubahan pendapatan masyarakat dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta menganalisis keterkaitan antara perubahan pendapatan masyarakat dan capaian kegiatan Coremap.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif untuk menjawab semua tujuan di atas. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dan kualitatif. Data yang dikumpulkan meliputi data primer, kuantitatif dan kualitatif, serta data sekunder. Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode dan teknik yang sesuai dengan sifat data. Data kuantitatif dikumpulkan menggunakan serangkaian pertanyaan yang disusun dalam kuesioner. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menggali data tentang rumah tangga serta individu yang menjawab kuesioner. Kuesioner ditanyakan kepada 108 rumah tangga terpilih, yaitu rumah tangga-rumah tangga yang juga menjadi sampel dalam penelitian

pertama dan kedua. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner dijawab oleh kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga yang mewakilinya. Data kualitatif dikumpulkan menggunakan beberapa teknik kualitatif, yaitu wawancara mendalam, *focus group discussion* (FGD), serta observasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan narasumber-narasumber dari berbagai kalangan, mulai dari pengelola program sampai dengan masyarakat yang menjadi target dari program tersebut, yang dipilih secara *snowballing*. Pemilihan narasumber dilakukan dengan mempertimbangkan penguasaan mereka terhadap materi serta data yang hendak digali. Analisis data dilakukan secara deskriptif, dengan mengkombinasikan data kuantitatif dan kualitatif. Kombinasi kedua data tersebut digunakan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu-isu yang diteliti.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kegiatan MPA yang dilakukan di Kelurahan Pulau Abang bervariasi. Beberapa kelompok masyarakat (pokmas) melakukan kegiatan yang terkait dengan sumber daya laut, yaitu budidaya ikan, terutama kerapu sunu menggunakan karamba jaring apung (KJA) dan karamba jaring tancap (KJT). Selain itu, terdapat pula pokmas-pokmas yang melakukan usaha ekonomi produktif (UEP) yang berbasis pada kegiatan-kegiatan di darat, antara lain pemeliharaan ternak (ayam) serta pembuatan kerupuk ikan dengan skala industri rumah tangga.

Selain untuk kegiatan UEP yang dilaksanakan secara berkelompok, di Kelurahan Pulau Abang juga dilaksanakan pemberian bantuan untuk UEP yang dilakukan secara individual. Bantuan ini diberikan kepada anggota masyarakat yang sudah mempunyai usaha produktif, misalnya membuat dan menjual lontong sayur atau memiliki warung (kecil) yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari, untuk menambah modal usaha. Dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan ini dikelola oleh lembaga pengelola sumber daya terumbu karang (LPSTK), antara lain berasal dari cicilan pengembalian modal usaha kelompok UEP yang sudah memperoleh keuntungan. Pemberian bantuan modal individu ini

baru berjalan beberapa bulan sebelum penelitian dilaksanakan dan juga baru dinikmati oleh beberapa orang anggota masyarakat.

Dalam perjalanannya, tidak semua pokmas MPA yang sudah terbentuk dapat mempertahankan kelangsungan usahanya. Beberapa pokmas menghentikan kegiatan karena berbagai alasan, antara lain tidak adanya motivasi dan keinginan anggota pokmas untuk bekerja secara berkelompok. Selama ini masyarakat di Kelurahan Pulau Abang terbiasa bekerja secara individual, sehingga sulit bagi mereka untuk melaksanakan pekerjaan secara bersama-sama dengan anggota kelompok. Pada beberapa pokmas yang masih bertahan, antara lain salah satu pokmas KJT, semua pekerjaan kelompok dikerjakan oleh ketua kelompok sampai tahap akhir, yaitu panen hasil budidaya.

Salah satu pokmas UEP, yaitu yang melakukan usaha pembuatan kerupuk ikan juga tidak dapat bertahan terutama karena kehabisan modal kerja. Proses pembuatan kerupuk yang dilakukan secara tradisional, misalnya mengeringkan adonan yang sudah dipotong-potong menjadi kerupuk dengan bantuan sinar matahari menyebabkan kelompok ini mengalami kerugian pada musim hujan akibat gagal produksi. Karena keterbatasan modal, beberapa kali kegagalan produksi yang akibat kurangnya sinar matahari menyebabkan modal kerja yang dimiliki makin lama makin menipis, sehingga tidak bisa digunakan untuk membiayai proses produksi selanjutnya.

Walaupun banyak pokmas yang tidak melanjutkan kegiatan UEP, penelitian ini menemukan bahwa pendapatan masyarakat, yang diperlihatkan oleh rumah tangga sampel dalam penelitian ini, mengalami peningkatan selama tahun 2005-2009. Namun demikian, pendapatan masyarakat mengalami fluktuasi selama periode waktu tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan masyarakat pada tahun 2007 (Rp. 1.219.400,-) menurun sebesar 7,4 persen dibanding tahun 2005 (Rp. 1.318.100,-), namun pada tahun 2009 meningkat sebesar 16 persen, menjadi Rp. 1.415.500,-. Secara umum,

rata-rata pendapatan rumah tangga pada tahun 2009 lebih tinggi 7,4 persen daripada pendapatan pada tahun 2005. Pola yang sama juga terjadi pada pendapatan rumah tangga per kapita, akan tetapi dengan fluktuasi penurunan dan peningkatan yang lebih kecil. Pola fluktuasi pendapatan di atas juga ditemukan pada pendapatan dari kegiatan kenelayanan.

Capaian kegiatan Coremap untuk meningkatkan pendapatan masyarakat masih di bawah target yang ditentukan oleh *Asian Development Bank* (ADB). ADB menyepakati target peningkatan pendapatan masyarakat dengan laju pertumbuhan sebesar 2 persen per tahun, sedangkan capaian Coremap sedikit lebih rendah, yaitu 1,8 persen per tahun. Namun demikian, karena peningkatan pendapatan dipengaruhi oleh berbagai faktor, tidak hanya sebagai dampak kegiatan Coremap, maka sulit untuk membandingkan target program ini dengan kenyataan yang terjadi pada masyarakat. Capaian Coremap yang terlihat nyata adalah pada aspek sosial, terutama terjadinya perubahan perilaku masyarakat terhadap sumber daya laut, termasuk dalam kegiatan eksploitasinya. Aktifitas-aktifitas kenelayanan yang dapat merusak sumber daya laut sudah ditinggalkan oleh nelayan penduduk Kelurahan Pulau Abang.

Peningkatan pendapatan tidak selalu berakibat pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini karena peningkatan pendapatan tidak seimbang dengan peningkatan biaya hidup akibat kenaikan harga barang-barang kebutuhan sehari-hari. Tingkat inflasi Kota Batam sebesar 7 persen per tahun jauh lebih tinggi daripada laju pertumbuhan pendapatan masyarakat. Akibatnya, kesejahteraan masyarakat tidak bisa meningkat.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Penelitian	7
1.3. Metodologi	7
1.4. Pembabakan Penulisan	10
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT	11
2.1. Kegiatan Mata Pencarian Alternatif (MPA)	11
2.1.1. Jenis Kegiatan dan Proses Pelaksanaan	12
2.1.2. Partisipasi dan Manfaat	23
2.1.3. Permasalahan dan Kendala	27
2.2. Program Bantuan Fisik Desa/Kelurahan	34
2.2.1. Jenis Kegiatan dan Proses Pelaksanaan	35
2.2.2. Partisipasi dan Manfaat	38
2.2.3. Permasalahan dan Kendala	42

BAB III PERUBAHAN PENDAPATAN MASYARAKAT	
3.1. Perubahan Pendapatan Rumah Tangga	45
3.2. Perubahan Pendapatan Rumah Tangga Nelayan	45
3.3. Pendapatan Rumah Tangga Anggota Pokmas	53
3.4. Capaian Ekonomi Coremap	61
BAB IV PENUTUP	66
4.1. Dampak Ekonomi Pelaksanaan Coremap	69
4.2. Perubahan Prilaku Masyarakat Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Laut (SDL)	70
4.3. Dampak Kegiatan atau Keberadaan Coremap Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat	72
	75
DAFTAR PUSTAKA	79

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Statistik Pendapatan Rumah Tangga per Bulan, Kelurahan Pulau Abang, 2005-2009.	46
Tabel 3.2 Pendapatan Rata-rata Rumah Tangga per Bulan Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Kepala Rumah Tangga, Kelurahan Pulau Abang, 2005-2009.	52
Tabel 3.3 Statistik Pendapatan Rumah Tangga per Bulan dari Kegiatan Kenelayanan, Kelurahan Pulau Abang, 2005-2009.	55
Tabel 3.4 Statistik Pendapatan Rumah Tangga per Bulan dari Kegiatan Kenelayanan Menurut Musim, Kelurahan Pulau Abang, 2005-2009.	60
Tabel 3.5 Statistik Pendapatan Rumah Tangga Anggota Pokmas dan Non Anggota Pokmas per Bulan, Kelurahan Pulau Abang, 2009.	63

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Distribusi Responden Penerima Bantuan Kegiatan MPA Coremap Menurut Jenis Bantuan, Kelurahan Pulau Abang, 2009, (%)	24
Gambar 2.2 Distribusi Responden Penerima Bantuan Kegiatan MPA Coremap Menurut Penggunaan Bantuan dan Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga, Kelurahan Pulau Abang, 2009 (%)	26
Gambar 2.3 Distribusi Responden Penerima Dana Bergulir Coremap dan Partisipasi Dalam Pembangunan Fisik Desa, Kelurahan Pulau Abang, 2009 (%)	40
Gambar 2.4 Distribusi Responden Menurut Manfaat Pembangunan Fisik Coremap, Kelurahan Pulau Abang, 2009 (%)	41
Gambar 3.1 Grafik Perubahan Rata-rata Pendapatan Rumah Tangga per Bulan, Kelurahan Pulau Abang, 2005-2009.	47
Gambar 3.2 Grafik Perubahan Rata-rata Pendapatan Rumah Tangga per Kapita per Bulan, Kelurahan Pulau Abang, 2005-2009 (%)	48
Gambar 3.3 Distribusi Rumah Tangga Menurut Kelompok Pendapatan per Bulan, Kelurahan Pulau Abang, 2005-2009 (%)	50
Gambar 3.4 Grafik Perubahan Rata-rata Pendapatan Rumah Tangga per Bulan dari Kegiatan Kenelayanan, Kelurahan Pulau Abang, Tahun 2005-2009 (%)	56

Gambar 3.5	Grafik Perubahan Rata-rata Pendapatan Rumah Tangga per Kapita per Bulan dari Kegiatan Kenelayanan, Kelurahan Pulau Abang, Tahun 2005-2009 (%).	57
Gambar 3.6	Persepsi Responden Mengenai Jumlah Hasil Tangkapan dan Pendapatan Melaut, Kelurahan Pulau Abang, 2005-2009 (%).	61
Gambar 3.7	Grafik Perubahan Rata-rata Pendapatan Rumah Tangga per Bulan dari Kegiatan Kenelayanan, Kelurahan Pulau Abang, Tahun 2005-2009 (%).	64

BAB I

PENDAHULUAN



1.1. LATAR BELAKANG

Kota Batam merupakan salah satu lokasi terpilih untuk pelaksanaan kegiatan Coremap pada fase kedua di wilayah barat Indonesia. Kegiatan Coremap di kota tersebut dilaksanakan di Kecamatan Galang, tepatnya di tiga kelurahan terpilih. Ketiganya adalah Kelurahan Pulau Abang yang meliputi P. Abang Besar, Air Saga, dan P. Petong, Kelurahan Karas (P. Karas Besar dan P. Mubut), serta Kelurahan Galang Baru (P. Nguan dan P. Sembur). Di Kelurahan Pulau Abang program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang mulai dilaksanakan sejak tahun 2005.

Meskipun hasil pemantauan memperlihatkan bahwa kondisi terumbu karang di wilayah perairan Kelurahan Pulau Abang tergolong baik¹, kegiatan Coremap perlu dilakukan untuk mempertahankan kondisi tersebut. Hal ini karena kegiatan ekonomi mayoritas penduduk Kelurahan Pulau Abang berbasis pada sumber daya laut, sehingga eksploitasi secara terus menerus dan dalam jumlah besar berpotensi menyebabkan penurunan kondisi terumbu karang dan sumber daya laut pada umumnya. Di samping itu, kebiasaan hidup sehari-hari yang dipraktikkan oleh mayoritas masyarakat kelurahan ini, seperti membuang sampah ke laut juga menjadi ancaman terhadap kehidupan terumbu karang. Berbagai jenis limbah dan sampah yang dibuang ke

¹ Hasil pemantauan yang dilakukan oleh tim peneliti Pusat Penelitian Oseonologi-LIPI (P2O-LIPI) pada tahun 2005 di 12 titik pengamatan di Kelurahan Pulau Abang memperlihatkan bahwa kondisi terumbu karang di 6 titik pengamatan termasuk kategori baik (tutupan karang > 60 persen).

laut merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan kerusakan sumber daya laut tersebut, di luar faktor alam.

(http://www.terangi.or.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=100&Itemid=1).

Semua kegiatan yang termasuk dalam program Coremap telah dilaksanakan di Kelurahan Pulau Abang, di bawah koordinasi kelima komponen Coremap, yaitu *Public Awareness (PA)*, *Community Based Management (CBM)*, *Monitoring, Controlling and Surveillance (MCS)*, *Institutional Strengthening (IS)* dan *Coral Reef Information and Training Center (CRITC)*. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kelima komponen tersebut mendukung tujuan Coremap fase kedua yaitu: (1) menjamin konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan ekosistem terumbu karang serta sumber daya yang terkait secara berkesinambungan; (2) memperkuat kapasitas masyarakat dan institusi lokal untuk mengelola ekosistem dan sumber daya terumbu karang; serta (3) menurunkan angka kemiskinan di kalangan masyarakat pesisir (PMO/NCU Coremap II, tanpa tahun).

Dalam rangka menurunkan angka kemiskinan masyarakat pesisir, Coremap telah melakukan beragam kegiatan di Kelurahan Pulau Abang, baik yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan tujuan tersebut. Kegiatan yang terkait langsung antara lain mengembangkan mata pencaharian alternatif di luar kegiatan kenelayanan tangkap. Mata pencaharian alternatif yang dikembangkan di antaranya berbasis perikanan budidaya seperti budidaya ikan, terutama kerapu, menggunakan karamba jaring apung (KJA) serta karamba jaring tancap (KJT), dan juga budidaya rumput laut karena kondisi perairan di sebagian wilayah Kelurahan Pulau Abang, khususnya di Air Saga sangat mendukung untuk kegiatan budidaya rumput laut. Mata pencaharian yang berbasis sumber daya darat, seperti beternak ayam dan pembuatan telur asin juga dilaksanakan dalam kegiatan ekonomi produktif tersebut. Selain itu, juga dikembangkan kegiatan mata pencaharian alternatif yang dilakukan di darat namun berbahan baku hasil laut, yaitu pembuatan kerupuk ikan (Romdiati dan Noveria, 2007a) dan pembuatan kerajinan dengan bahan baku limbah hasil laut seperti kerang dan ketam (Sembiring, 2009).

Mata pencaharian alternatif diciptakan dan dikembangkan untuk mengurangi ketergantungan ekonomi masyarakat yang tinggi pada kegiatan eksploitasi sumber daya laut. Pada tahun 2005 sekitar 80 persen penduduk Kelurahan Pulau Abang menjadikan laut sebagai sumber mata pencaharian utama (Romdiati dan Mita Noveria, 2007a). Meskipun pada tahun 2007 terjadi penurunan, proporsi penduduk Kelurahan Pulau Abang yang bekerja sebagai nelayan masih tergolong besar, yaitu sekitar 76 persen (Romdiati dan Noveria, 2007b). Ketergantungan ekonomi yang tinggi terhadap sumber daya laut sangat potensial menciptakan kerusakan terumbu karang dan juga sumber daya laut pada umumnya karena masyarakat cenderung melakukan penangkapan secara berlebihan, disertai dengan praktik-praktik penangkapan berbagai jenis sumber daya laut yang merusak (<http://www.wri.org/publication/content/8135>). Ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya laut, ditambah dengan pertumbuhan penduduk yang cepat, menyebabkan penciptaan mata pencaharian alternatif menjadi salah satu solusi untuk menjaga kelestarian terumbu karang.

Kedaaan di Kelurahan Pulau Abang sesungguhnya menggambarkan kondisi penduduk di wilayah pesisir dan perairan Indonesia pada umumnya. Saat ini sekitar 60 persen dari 212 juta penduduk Indonesia tinggal di daerah pesisir dan menggantungkan kehidupan mereka pada sumber daya laut, termasuk terumbu karang (<http://geo.ugm.ac.id/archives/100>). Di beberapa daerah tertentu, masyarakat lokal sangat bergantung kepada berbagai jenis terumbu karang dan hewan-hewan laut yang hidup di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan pangan dan juga untuk diperdagangkan, seperti berbagai jenis ikan, moluska (hewan bertubuh lunak yakni kerang dan siput laut), krustasea (udang-udangan), dan ekinodermata (hewan berkulit duri seperti teripang) serta penyu (http://www.terangi.or.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=41).

Penciptaan dan pengembangan mata pencaharian alternatif diasumsikan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat karena selama ini pendapatan mereka berfluktuasi berdasar kondisi cuaca dan gelombang

laut. Hal ini terbukti dari hasil penelitian mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dilakukan di Kelurahan Pulau Abang pada tahun 2005 dan 2007. Kedua penelitian tersebut memperlihatkan rata-rata pendapatan rumah tangga nelayan setiap bulan mencapai jumlah tertinggi pada saat musim gelombang lemah. Sebaliknya, jumlah paling rendah diperoleh pada musim ombak kuat. Pada tahun 2005 pendapatan rata-rata rumah tangga nelayan per bulan pada musim gelombang kuat sekitar 55 persen lebih rendah dibanding pendapatan pada musim gelombang lemah, dan pada tahun 2007 perbedaannya sekitar 38 persen (Romdiati dan Noveria, 2007). Dengan mengembangkan mata pencaharian alternatif, maka fluktuasi pendapatan masyarakat pesisir dapat dihindari karena tidak terpengaruh oleh kondisi cuaca dan musim gelombang. Artinya, masyarakat bisa memperoleh pendapatan secara konstan sepanjang musim.

Kegiatan yang tidak secara langsung berkaitan dengan pengurangan kemiskinan yang dilakukan Coremap adalah menjaga kelestarian terumbu karang yang menjadi tempat hidup berbagai sumber daya laut, termasuk jenis-jenis ikan untuk kebutuhan konsumsi manusia (<http://www.lablinc.or.id/Eko/Wetland/lhbs-trmbu.htm>; <http://www.goblue.or.id/tentang-terumbu-karang>). Burke, dkk. (2007) mengemukakan bahwa di wilayah Indonesia timur saja terdapat lebih dari 1.650 spesies ikan karang. Fakta menunjukkan bahwa pada tahun 1997 berbagai jenis ikan karang Indonesia merupakan penyumbang utama produksi perikanan dunia, yaitu sebesar 3,6 juta ton dari seluruh produksi. Berdasarkan perhitungan Herman Cesar, terumbu karang yang dikelola dengan baik dan terjaga kelestariannya akan memberikan hasil perikanan sebanyak 25 ton/km² (Departemen Perikanan dan Kelautan, 2007). Selain ikan untuk konsumsi pangan, terumbu karang di Indonesia juga menjadi tempat hidup bagi sekitar 253 jenis ikan hias (<http://geo.ugm.ac.id/archives/100>) yang juga mempunyai nilai ekonomi tinggi, sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang penting di sektor perikanan. Terumbu karang yang dikelola dengan baik merupakan potensi sumber daya alam penghasil pendapatan yang besar bagi negara untuk mendanai pembangunan pada umumnya, yang secara

tidak langsung akan dinikmati pula oleh masyarakat di wilayah pesisir dan kepulauan.

Kegiatan pelestarian terumbu karang (dalam konteks ekologi) antara lain dilakukan melalui pengawasan terhadap aktifitas-aktifitas manusia yang menimbulkan kerusakan pada jenis sumber daya laut tersebut. Pengawasan dilakukan terutama oleh kelompok masyarakat (pokmas) yang dibentuk dengan tugas utama mencegah aktifitas perusakan terumbu karang dan sumber daya laut pada umumnya, yaitu pokmas pengawasan. Salah satu kegiatan pokmas pengawasan adalah patroli di wilayah perairan lokasi Coremap, termasuk di sekitar daerah perlindungan laut (DPL) yang penetapannya dilakukan melalui kesepakatan masyarakat. Dalam praktiknya, kegiatan pengawasan tidak hanya dilaksanakan oleh anggota pokmas, melainkan juga oleh mereka yang tidak tergabung dalam pokmas pengawasan. Aktifitas ini dilakukan pada saat nelayan turun ke laut dan melaporkan pelanggaran yang ditemui kepada anggota/ketua pokmas pengawasan. Di samping itu, juga dilakukan upaya penyadaran masyarakat agar tidak mengeksploitasi sumber daya laut menggunakan armada, alat tangkap, serta teknologi penangkapan yang dapat menimbulkan kerusakan terumbu karang.

Keterlibatan masyarakat, terutama yang tergabung dalam berbagai pokmas kegiatan Coremap sangat menentukan keberhasilan program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip program ini, yaitu memberikan wewenang dan kepercayaan kepada masyarakat untuk menentukan sendiri kebutuhannya, merencanakan, dan mengambil keputusan secara terbuka dan bertanggungjawab (Departemen Perikanan dan Kelautan, 2007). Agar masyarakat terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan Coremap, mereka perlu dibekali dengan pengetahuan yang lengkap mengenai program tersebut. Tanpa pengetahuan dan keterlibatan aktif masyarakat yang tinggal di lokasi Coremap, target program yang direncanakan niscaya sulit dicapai.

Untuk mengetahui keberhasilan Coremap diperlukan evaluasi dengan mengkaji capaian masing-masing kegiatan yang telah dilaksanakan.

Khusus untuk target mengurangi angka kemiskinan, perlu dilakukan evaluasi dengan menggunakan indikator-indikator yang sensitif. Pemerintah Indonesia dan *Asian Development Bank* (ADB), yang ikut mendanai sebagian program pelestarian dan pengelolaan terumbu karang tersebut telah menyepakati dua indikator untuk mengukur keberhasilan Coremap dalam mengurangi angka kemiskinan, yaitu: (1) peningkatan pendapatan masyarakat di lokasi Coremap sebesar 2 persen per tahun dan (2) peningkatan taraf hidup sekitar 10.000 rumah tangga pada akhir program (Project Appraisal Document, 2005). Evaluasi untuk indikator pertama dapat dilakukan setiap tahun guna mengetahui dampak (positif) Coremap terhadap kehidupan ekonomi masyarakat, sedangkan capaian untuk indikator kedua dievaluasi setelah program ini selesai dilaksanakan. Salah satu cara untuk mengevaluasi capaian Coremap adalah dengan melakukan penelitian, dengan membandingkan pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah kegiatan Coremap dilaksanakan.

Sebelum Coremap dilaksanakan (T0) dilakukan penelitian di lokasi Coremap di Kelurahan Pulau Abang untuk mendapatkan gambaran awal mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk pendapatan dari berbagai sektor pekerjaan. Setelah dua tahun berselang (T1, tahun 2007) dilaksanakan penelitian kedua untuk mengetahui dampak program selama waktu tersebut. Dua tahun sesudah penelitian kedua, yaitu tahun 2009 (T2) kembali dilaksanakan penelitian untuk mendapatkan gambaran mengenai dampak Coremap setelah program berjalan selama empat tahun. Dengan membandingkan kondisi sosial ekonomi, terutama pendapatan masyarakat di lokasi Coremap pada saat T0, T1, dan T2 dapat diketahui dampak program bagi masyarakat di Kelurahan Pulau Abang. Jika penelitian pada saat T1 dan T2 kegiatan Coremap memperlihatkan hasil yang sesuai dengan target program, maka dapat dikatakan bahwa program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang yang mulai dilaksanakan di Kelurahan Pulau Abang pada tahun 2005 ini berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun jika sebaliknya, capaian program tidak sesuai dengan rencana, maka dapat

dikatakan bahwa Coremap tidak memberikan dampak positif terhadap peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kelurahan Pulau Abang.

1.2. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengkaji capaian pelaksanaan Coremap, khususnya perubahan pendapatan masyarakat yang dikaitkan dengan kegiatan mata pencaharian alternatif (MPA).

Tujuan Khusus

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk:

1. Mengkaji jenis kegiatan mata pencaharian alternatif (MPA) dan permasalahan/kendala dalam pelaksanaannya.
2. Menggambarkan perubahan pendapatan masyarakat dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhinya.
3. Menganalisis keterkaitan antara perubahan pendapatan masyarakat dan capaian kegiatan Coremap.

1.3. METODOLOGI

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Pulau Abang guna mengetahui capaian Coremap yang telah berjalan sejak tahun 2005, khususnya untuk meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat, melalui peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lokasi Coremap. Berbagai upaya untuk mencapai tujuan tersebut telah dilaksanakan Coremap di kelurahan ini, antara lain menciptakan dan mengembangkan mata pencaharian alternatif. Di samping untuk meningkatkan pendapatan

masyarakat, kegiatan tersebut juga ditujukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya laut yang selama ini sangat tinggi.

Penelitian ini mengumpulkan data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, dengan teknik yang sesuai dengan jenis data. Kedua jenis data saling melengkapi, sehingga dapat memperkaya analisis. Pengumpulan data kuantitatif dilakukan dengan teknik survei menggunakan serangkaian pertanyaan yang disusun dalam kuesioner. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu tentang kondisi rumah tangga dan juga kondisi individu. Untuk rumah tangga, pertanyaan-pertanyaan antara lain pendapatan rumah tangga dari berbagai lapangan pekerjaan, keterlibatan anggota rumah tangga dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Coremap, serta manfaatnya bagi rumah tangga. Pertanyaan-pertanyaan untuk individu meliputi perubahan armada dan alat tangkap serta jumlah hasil tangkap dan penghasilan yang diperoleh sejak kegiatan Coremap dilaksanakan di lokasi tempat tinggal mereka. Kuesioner ditanyakan kepada kepala rumah tangga. Jika kepala rumah tangga tidak bisa ditemui, anggota rumah tangga (dewasa) yang mengetahui informasi-informasi mengenai rumah tangga menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner.

Data kuantitatif dikumpulkan dari rumah tangga terpilih yang juga menjadi sampel dalam dua penelitian sebelumnya. Pemilihan rumah tangga dilakukan pada semua RT yang terdapat di Kelurahan Pulau Abang dengan memperhatikan unsur proporsionalitas. Artinya, pada RT yang mempunyai rumah tangga, lebih banyak pula rumah tangga yang dipilih menjadi sampel. Pergantian rumah tangga terjadi jika pada saat pengumpulan data rumah tangga terpilih dalam penelitian sebelumnya tidak dapat ditemui, terutama karena pindah ke luar lokasi atau bepergian ke luar daerah dan belum kembali sampai waktu penelitian berakhir. Rumah tangga pengganti dipilih dari rumah tangga terdekat dengan rumah tangga sampel penelitian sebelumnya.

Data yang tidak bisa diperoleh melalui metode kuantitatif dikumpulkan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data kualitatif dilakukan

dengan menggunakan beberapa teknik kualitatif. Salah satu di antaranya adalah wawancara mendalam yang dilakukan dengan narasumber-narasumber terpilih. Narasumber berasal dari berbagai kalangan, antara lain pelaksana Coremap mulai dari tingkat kabupaten sampai dengan pengelola LPSTK di Kelurahan Pulau Abang, anggota masyarakat penerima bantuan, khususnya untuk kegiatan mata pencaharian alternatif dan kegiatan ekonomi produktif, serta pimpinan formal dan informal di kelurahan tersebut. Pemilihan narasumber dilakukan secara *snowballing*, dengan mempertimbangkan penguasaan mereka terhadap informasi yang digali. Selain itu, juga dilakukan observasi, terutama untuk mendapatkan pemahaman tentang kegiatan mata pencaharian alternatif yang dilakukan oleh penerima bantuan dari Coremap, di samping bantuan lain seperti untuk pembangunan fisik kelurahan.

Dalam penelitian ini juga dikumpulkan data sekunder yang relevan dengan substansi penelitian. Data tersebut berasal dari berbagai institusi, antara lain Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencana Pembangunan Kota (Bappeko) Batam, serta institusi-institusi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Coremap, terutama sektor perikanan. Selain data statistik, juga dikumpulkan data sekunder berupa hasil penelitian yang terkait dengan topik penelitian serta dokumen-dokumen mengenai kebijakan pengelolaan sumber daya laut dan Coremap serta petunjuk pelaksanaannya. Pengumpulan data tersebut dilakukan melalui metode *desk review*.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif analisis. Data kuantitatif hasil survei dianalisis menggunakan tabulasi silang antar variabel-variabel yang diteliti, Data kualitatif dianalisis dengan teknik analisis isi (*content analysis*), dengan terlebih dulu mengelompokkannya berdasarkan tema-tema yang dianalisis. Analisis dilakukan dengan mengkombinasikan data kuantitatif dan kualitatif sehingga diperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai pelaksanaan Coremap, khususnya kegiatan pengembangan ekonomi dan dampaknya terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

1.4. PEMBABAKAN PENULISAN

Laporan penelitian ini terdiri dari empat bab dengan fokus pembahasan yang berbeda-beda pada masing-masing bab. Laporan diawali dengan Bab I, Pendahuluan, yang berisi penjelasan mengenai latar belakang dilakukannya penelitian, tujuan serta metode yang digunakan, baik dalam pengumpulan maupun pengolahan data. Bab II berisi informasi dan analisis mengenai kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat yang dilakukan Coremap. Fokus bahasan pada bab ini adalah kegiatan mata pencaharian alternatif, mencakup proses pelaksanaan, partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut, serta hambatan dan kendala dalam pelaksanaannya. Di samping itu, juga dibahas manfaat kegiatan mata pencaharian alternatif terhadap perbaikan kondisi ekonomi rumah tangga, khususnya peningkatan pendapatan. Dalam bab II juga dibahas kegiatan pembangunan fisik yang dilakukan dengan bantuan dari Coremap. Jenis-jenis bantuan, keterlibatan masyarakat, serta manfaat yang diperoleh dari kegiatan pembangunan fisik juga menjadi bahasan pada bab ini. Bab III berisi analisis mengenai perubahan pendapatan masyarakat setelah kegiatan Coremap berlangsung selama empat tahun di Kelurahan Pulau Abang. Analisis pendapatan dilakukan secara menyeluruh, mencakup pendapatan rumah tangga yang berasal dari berbagai lapangan pekerjaan. Khusus untuk sektor perikanan tangkap, analisis juga dilakukan untuk setiap musim gelombang, yaitu gelombang tenang, pancaroba, dan gelombang kuat. Pendapatan rumah tangga anggota pokmas dan bukan anggota pokmas Coremap juga dibahas dalam Bab III untuk melihat perbedaan di antara keduanya. Laporan ini ditutup dengan Bab IV, Penutup, yang berisi analisis mengenai dampak Coremap terhadap kehidupan masyarakat dari berbagai aspek, baik ekonomi maupun non ekonomi. Dari sisi non ekonomi, analisis difokuskan pada perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut. Selain itu, pembahasan juga meliputi dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat sebagai dampak pelaksanaan Coremap.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT

Salah satu tujuan yang hendak dicapai Coremap tahap kedua adalah menurunannya angka kemiskinan di antara masyarakat pesisir. Tujuan ini sangat terkait dengan perbaikan kondisi ekonomi masyarakat. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kondisi ekonomi menjadi salah satu fokus dari Coremap fase kedua yang telah dilaksanakan sejak tahun 2001.

Peningkatan kondisi ekonomi dapat dilakukan antara lain dengan menciptakan dan mengembangkan mata pencaharian alternatif (MPA). Hal ini memungkinkan masyarakat pesisir tidak hanya bergantung pada satu sumber mata pencaharian, pada umumnya kegiatan kenelayanan tangkap, seperti yang selama ini terjadi. Selain itu, kesempatan untuk memperoleh penghasilan yang lebih besar juga terbuka karena di luar perikanan tangkap, aktifitas ekonomi dilakukan tanpa terpengaruh oleh cuaca, khususnya gelombang laut.

Bab ini membahas kegiatan ekonomi yang dilakukan Coremap di Kelurahan Pulau Abang. Pembahasan difokuskan pada pelaksanaan kegiatan mata pencaharian alternatif. Selain itu, program bantuan fisik desa, yang merupakan salah satu jenis bantuan pembiayaan lainnya yang diberikan oleh Coremap II, juga akan dibahas pada bagian bab ini.

2.1. Kegiatan Mata Pencaharian Alternatif (MPA)

Kegiatan mata pencaharian alternatif (MPA) merupakan salah satu usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menjadi bagian dari

kegiatan pengelolaan terumbu karang yang dilaksanakan oleh COREMAP. Usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program MPA ini dilaksanakan dengan berbagai strategi dan kegiatan, seperti usaha pengolahan hasil perikanan, usaha budidaya perikanan, kesadaran pengelolaan uang keluarga, pengembangan usaha pelayanan pemancingan dan ekowisata, serta pengembangan usaha peternakan (Yayasan Laksana Samudera, 2008). Selain itu, kegiatan MPA juga ditujukan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat yang tinggi terhadap eksploitasi sumber daya laut, sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya.

Pada sub bab ini dibahas proses pelaksanaan berbagai kegiatan MPA di Kelurahan Pulau Abang. Pembahasan mencakup partisipasi dan manfaat kegiatan ini bagi penduduk setempat serta permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan MPA.

2.1.1. Jenis Kegiatan dan Proses Pelaksanaan

Kegiatan MPA di Pulau Abang dimulai pada tahun 2005 setelah dilaksanakannya sosialisasi dan pembentukan kelompok masyarakat (pokmas). Pokmas merupakan organisasi atau kelompok masyarakat yang mempunyai tujuan atau tugas tertentu dalam pengelolaan terumbu karang serta rencana kegiatan peningkatan kesejahteraan anggotanya dalam bentuk mata pencaharian alternatif (LPSTK Kelurahan Pulau Abang, 2007). Sosialisasi pokmas di Kelurahan Pulau Abang pada tahun 2005 tersebut berhasil membentuk 26 pokmas UEP (usaha ekonomi produktif) dan pokmas jender yang diarahkan untuk melakukan kegiatan MPA. 26 pokmas ini tersebar di seluruh lokasi Coremap yang berada di bawah koordinasi LPSTK Kelurahan Pulau Abang, terdiri dari 11 pokmas di Pulau Petong, 11 Pokmas di Pulau Abang Kecil dan 4 Pokmas di Air Saga. Kegiatan MPA yang dilakukan oleh tiap pokmas cukup bervariasi, namun umumnya didominasi oleh kegiatan budidaya keramba, baik keramba jaring tancap (KJT) ataupun keramba jaring apung (KJA). Jenis kegiatan ekonomi lain yang dilakukan oleh pokmas di Kelurahan Pulau

Abang adalah pembuatan kerupuk ikan, beternak ayam, beternak kambing, serta kegiatan pertanian dan perkebunan (Romdiati dan Noveria, 2007b).

Meskipun pokmas-pokmas tersebut mulai dibentuk pada tahun 2005, namun kegiatan ekonomi kelompok ini umumnya baru berjalan pada tahun 2006-2007, seiring dengan turunnya dana bantuan untuk modal usaha yang diberikan oleh Coremap. Sebelum memulai kegiatan ekonomi produktif, anggota Pokmas mendapat beberapa pelatihan, seperti pelatihan *home industry* (industri rumah tangga), pelatihan pengelolaan budidaya ikan, dan pelatihan pengelolaan keuangan, yang diharapkan dapat menunjang usaha kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh tiap pokmas.

Pada tahun 2006, pihak Coremap Kota Batam menawarkan pelaksanaan uji coba MPA terhadap beberapa pokmas di Kelurahan Pulau Abang. Dalam uji coba ini, jenis MPA yang akan dilaksanakan oleh kelompok masyarakat telah ditentukan sebelumnya oleh pihak Coremap. Pihak Coremap menawarkan MPA berupa keramba jaring apung (KJA), dengan bantuan berbentuk penyediaan bibit dan alat, serta pemberian uang pakan dan biaya operasional. Empat pokmas yang akhirnya bergabung dalam uji coba pertama di Kelurahan Pulau Abang ini adalah Pokmas Keramba Mandiri dan Pokmas Karang Jaya di Pulau Abang serta Pokmas Tiger Fish dan Pokmas Usaha Bersama di Air Saga.

Selain pelaksanaan uji coba MPA budidaya perikanan, pengguliran dana bantuan pada tahap awal juga diberikan pada kelompok UEP yang melakukan kegiatan industri rumah tangga berupa usaha pembuatan kerupuk ikan. Ada dua kelompok pembuatan kerupuk ikan yang menerima bantuan ini yaitu Pokmas Bunga Tanjung dan Pokmas Mawar Merah. Namun banyaknya kendala yang dihadapi oleh anggota pokmas ini, baik kendala teknis maupun non teknis, membuat kegiatan produksi kedua pokmas ini menjadi tersendat.

Setelah melalui tahap uji coba, mekanisme pemberian bantuan MPA Coremap II pada tahun 2007 mulai memberlakukan sistem *community*

contract, yang memberikan kewenangan pengelolaan keuangan oleh LPSTK setempat. Berbeda dengan sistem uji coba yang mewajibkan pokmas hanya mengembalikan 60 persen dari jumlah bantuan yang diberikan oleh Coremap, *community contract* merupakan sistem pemberian bantuan yang mewajibkan pokmas mengembalikan 100 persen total biaya usaha dari Coremap dalam masa pengembalian yang telah ditentukan LPSTK, dengan tambahan bunga 10 persen per tahun.

Selain perbedaan pada kewajiban pengembalian bantuan, tahap uji coba dan *community contract* juga berbeda dalam sistem pemberian bantuannya. Bantuan pada tahap uji coba diberikan melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Coremap. Pihak ketiga ini bertugas untuk mengelola dana bantuan tersebut, seperti untuk membeli bibit ataupun peralatan yang kemudian akan diserahkan kepada masing-masing pokmas. Dalam sistem *community contract*, pihak LPSTK setempat diberikan keleluasaan untuk membeli sendiri bibit dan peralatan produksi yang diperlukan, sebelum diserahkan pada masing-masing pokmas yang berada di wilayahnya. Sistem ini dirasa lebih menguntungkan bagi pengurus LPSTK Pulau Abang sebab mereka dapat membeli barang-barang yang mereka butuhkan sendiri, dengan kualitas yang baik dan harga terjangkau.

Sistem *community contract* juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengusulkan kegiatan MPA yang ingin mereka lakukan dan tidak lagi semata-mata berdasarkan ketentuan pihak Coremap. Ragam kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat Kelurahan Pulau Abang yang termuat dalam dokumen RPTK kelurahan ini antara lain usaha keramba jaring tancap (KJT), budidaya rumput laut, pembuatan kerupuk ikan, kedai pesisir, industri rumah tangga dan kios BBM. Dalam pelaksanaannya, sebagian besar pokmas penerima bantuan *community contract* di Kelurahan Pulau Abang memiliki jenis kegiatan di bidang budidaya perikanan, baik keramba jaring tancap maupun keramba jaring apung. Selain usaha budidaya perikanan, terdapat juga jenis kegiatan usaha lain yang menerima bantuan dari *community contract* Coremap II seperti kerupuk ikan (pokmas yang sama dengan

penerima bantuan pada tahap uji coba), pembuatan telur asin, industri kerajinan kerang-kerangan, industri kerajinan batu cincin, kedai pesisir serta kios BBM (bahan baker minyak).

Seluruh dana pengembalian dari pokmas kemudian dikelola oleh LPSTK setempat untuk pengembangan kegiatan LPSTK tersebut. Di LPSTK Kelurahan Pulau Abang, dana pengembalian pokmas telah digulirkan kembali sebagai dana simpan pinjam bagi masyarakat. Jika pengguliran dana melalui pokmas mengharuskan masyarakat yang menerima bantuan tergabung dalam suatu kelompok, maka dana simpan pinjam yang digulirkan oleh LPSTK ini dapat diberikan kepada individu namun dengan persyaratan bahwa pinjaman ini digunakan sebagai modal usaha.

Dana simpan pinjam bagi individu ini mulai digulirkan oleh LPSTK Pulau Abang pada awal tahun 2009. Seleksi untuk penerima pinjaman bagi individu/perorangan dilakukan oleh pengurus LPSTK setempat, dengan besar pinjaman berkisar antara 1-5 juta rupiah dan dikenai bunga sebesar 10 persen serta wajib memberikan jaminan. Lama waktu pengembalian ditentukan berdasarkan jumlah pinjamannya. Pinjaman sebesar 1-4 juta dikembalikan dalam jangka waktu 6 bulan, sedangkan pinjaman di atas 5 juta rupiah dikembalikan dalam 1 tahun. Pemberian pinjaman kepada individu ini disambut baik oleh masyarakat di Pulau Abang, terbukti dengan banyaknya masyarakat yang mengajukan permohonan untuk memperoleh dana tersebut. Meskipun demikian, berdasarkan kondisi keuangan LPSTK Pulau Abang, penerima dana bantuan individu sampai dengan kuartal pertama tahun 2009 baru mencapai 9 orang. Jenis usaha yang dilakukan oleh penerima bantuan individu ini umumnya usaha industri rumah tangga dan usaha perdagangan.

Pelaksanaan kegiatan MPA di Kelurahan Pulau Abang didampingi oleh *field facilitator* (FF) dan penyuluh lapangan yang memiliki peranan cukup penting. FF bertugas untuk menangani pelaksanaan kegiatan MPA dari aspek *community development* serta penguatan kelembagaan, sedangkan penyuluh lapangan memiliki tugas utama untuk menangani

aspek teknis dalam pelaksanaan kegiatan MPA. Bimbingan teknis yang dilakukan oleh penyuluh lapangan terutama ditujukan bagi MPA budidaya perikanan. Penyuluh lapangan bekerja di bawah koordinasi CBM Coremap II, sementara FF berada dalam koordinasi LSM yang menjadi rekanan Coremap II dalam pelaksanaan kegiatan MPA. Keberadaan FF di tiap lokasi Coremap II berdasarkan kontrak yang dilakukan tiap tahun oleh pihak LSM pemenang lelang. Hal ini berdampak pada seringnya terjadi kekosongan posisi FF terutama pada awal tahun, ketika tender untuk LSM yang dikontrak belum dilakukan. Pada saat tersebut, penyuluh lapangan mengambil alih tugas FF di samping juga tetap menjalankan tugas utamanya.

Penyuluh lapangan juga melakukan pemeriksaan rutin terhadap pembukuan keuangan masing-masing pokmas, baik pokmas budidaya perikanan maupun non budidaya perikanan. Adanya pelatihan pengelolaan keuangan yang diberikan pada awal pembentukan pokmas cukup membantu anggota kelompok dalam mengelola keuangan kelompoknya. Penyuluh yang bekerja di lokasi ini, kadang juga menemui hambatan terutama ketika menangani MPA di luar bidang keahliannya. Para penyuluh yang umumnya berlatarbelakang ilmu perikanan, tidak bisa memberikan banyak asistensi ketika terjadi permasalahan teknis pada jenis-jenis MPA non budidaya perikanan seperti MPA industri rumah tangga, karena hal ini di luar bidang keahlian para penyuluh. Oleh karena itu, penyuluh lebih banyak memberikan asistensi pada bidang non teknis pada jenis kegiatan MPA non perikanan, seperti penguatan kelembagaan maupun pengelolaan keuangan pokmas.

Proses pelaksanaan kegiatan budidaya perikanan seperti KJA atau KJT meliputi beberapa tahap antara lain penyiapan keramba, penebaran benih, pemberian pakan, pembersihan keramba, dan perawatan ikan serta pengamatan pertumbuhan ikan. Tahap awal seperti penyiapan keramba dan penebaran benih umumnya melibatkan seluruh anggota pokmas. Namun, dalam tahap pemberian pakan dan perawatan ikan, tidak semua anggota pokmas dapat terlibat. Alasan utama anggota

pokmas yang tidak dapat aktif dalam kegiatan ini adalah kesibukan melakukan pekerjaan lainnya. Sistem piket diberlakukan oleh anggota pokmas dalam pembagian tugas pemberian pakan dan penjagaan keramba di malam hari. Khusus untuk tugas penjagaan keramba, anggota pokmas yang mendapat giliran jaga harus menginap di keramba. Selain anggota pokmas, biasanya ada juga orang yang disewa untuk memberi pakan dan menjaga keramba jika anggota pokmas berhalangan. Setiap anggota pokmas ataupun orang luar yang melakukan tugas pemberian pakan dan penjagaan keramba ini akan diberikan upah yang diambil dari dana operasional pokmas.

Pada tahap pengamatan pertumbuhan ikan, pelaksanaan pengawasan dan monitoring sangat menentukan keberhasilan pokmas budidaya keramba. Para penyuluh melakukan pengawasan dan monitoring sekaligus memberikan bimbingan teknis berupa asistensi dalam kegiatan seperti *sampling*¹, *grading*², pemberian vitamin dan pengobatan. Dalam kegiatan yang berbasis *community contract*, tahap pengawasan dan monitoring ini merupakan fase penting karena dapat menentukan jumlah dana untuk pakan yang akan diterima. Hasil *sampling* yang dilakukan tiap bulan digunakan sebagai patokan untuk pemberian uang pakan bagi masing-masing pokmas KJT. Jika berat badan ikan tidak sesuai dengan usianya, penyuluh mengurangi jumlah uang pakan yang dapat diterima oleh pokmas. Sebagai contoh, setelah 4 bulan, 4-5 ekor ikan kerapu seharusnya memiliki berat 1 kg. Jika beratnya kurang dari 1 kg, maka untuk periode selanjutnya penyuluh merekomendasikan agar tidak memberikan uang pakan berdasarkan perhitungan umur ikan, melainkan menggunakan perhitungan kebutuhan pakan ikan menurut beratnya.

¹ Sampling merupakan kegiatan pengambilan sampel untuk mengetahui pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan yang dilakukan secara rutin dalam kurun waktu tertentu. Data yang diamati adalah pertumbuhan panjang, lebar (tinggi) dan berat ikan (Sumber : <http://ikanmania.wordpress.com/2007/12/31/>)

² Grading merupakan pemisahan ikan menurut ukurannya agar tidak terjadi kanibalisme antar ikan. Perbedaan pertumbuhan ukuran ikan ini dapat terjadi akibat pertumbuhan ikan yang tidak merata, (Sumber : <http://ikanmania.wordpress.com/2007/12/31/>)

Selain itu, tingkat keberlangsungan hidup ikan juga turut diperhatikan dalam tahap ini. Tingkat kematian ikan umumnya sebesar 10 persen dari jumlah bibit awal dan biasanya terjadi pada bulan-bulan awal kegiatan budidaya³. Selain itu, pokmas juga diharuskan melakukan *grading* dan pencucian jaring tiap bulan.

Dari keempat pokmas dalam tahap uji coba di Pulau Abang, hanya satu pokmas yaitu Pokmas "Tiger Fish" (Air Saga) yang telah berhasil melakukan panen pertama pada awal tahun 2008. Saat ini kelompok tersebut telah melaksanakan kegiatan tahap kedua yang mendapat bantuan dana dari sistem *community contract*. Pada awalnya (tahap uji coba), pokmas ini beranggotakan 7 orang dan mendapat bantuan sebesar 50 juta rupiah. Menurut ketentuan, bantuan ini hanya dikembalikan 60 persen dari total bantuan dengan pengembalian 3 juta rupiah per tahun selama 5 tahun. Sayangnya, sebagian besar anggota memilih mengundurkan diri pada tahap penebaran bibit karena melihat bibit yang disediakan berukuran sangat kecil. Satu orang anggota pokmas yang tersisa memutuskan untuk tetap melanjutkan usaha budidaya ini, dibantu dengan anggota keluarganya. Setelah melewati masa pemeliharaan, anggota pokmas ini berhasil mendapatkan hasil panen sebesar 16 juta rupiah dan telah mengembalikan bantuan dari Coremap sebesar 3 juta rupiah.

Keberhasilan pada tahap uji coba tersebut membuat pihak Coremap menawarkan kembali bantuan pendanaan dengan sistem *community contract*. Ketika memasuki musim tanam yang kedua, pokmas "Tiger Fish" kemudian mengadakan perekrutan anggota kembali, sehingga jumlah anggotanya menjadi 5 orang. Dari kelima orang ini, yang aktif dalam kegiatan pemeliharaan keramba hanya 3 orang, sementara sisanya tidak aktif karena memiliki kesibukan pekerjaan yang lain. Ketiga anggota pokmas yang aktif ini secara bergantian bertugas memberikan

³ Kegiatan budidaya perikanan umumnya melakukan panen setelah 9 bulan dari awal penebaran bibit.

pakan dan menjaga keramba pada malam hari. Jika seluruh anggota pokmas berhalangan, maka mereka mengupah orang lain untuk melaksanakan tugas pemeliharaan keramba. Khusus untuk tugas menjaga keramba, orang yang diupah diharuskan menginap di keramba dan mereka diberikan upah Rp 10.000,- per malam yang dananya diambil dari uang operasional pokmas.

Saat penelitian ini dilakukan, Pokmas "Tiger Fish" akan segera memanen 4 lubang keramba yang terdiri dari 3 lubang hasil bantuan tahap kedua melalui mekanisme *community contract* dan 1 lubang berisi bibit yang dibeli dengan keuntungan dari bantuan pada tahap uji coba. Pada saat pokmas telah memasuki masa panen, seluruh anggota pokmas, pengurus LPSTK, penyuluh dan konsultan bersama-sama melakukan pemantauan harga di berbagai pasar lokal maupun internasional, dalam rangka mencari penawaran harga tertinggi. Kondisi pencarian harga tertinggi ini tergambar dalam pernyataan narasumber dalam kutipan wawancara berikut ini,

T Tapi kalau misalnya bapak juga punya channel sendiri boleh nggak?

J Tak masalah bu. Asalnya meningkat harga ya.

T Jadi bapak boleh milih lah ya misalnya ada yang harga...

J Kalau di konsultan agak murah, konsultan memang 100, ada yg 120, bapak ke sana aja, cuma larinya pembayaran tetap aja, di sini ada kemudahannya. Jadi ada kebebasan gitu, tidak tertekan kita. Tapi kalau memang tidak ada semua kita langsung kasih ke konsultan, juga sama2, kita sama2 dapat ya, dapat apa, dapat apa, dapat kerja sudah terang itu (wawancara dengan Bp. Sk)

Dua pokmas uji coba lain di kelurahan ini yaitu Pokmas Keramba Mandiri dan Karang Jaya (keduanya di Pulau Abang) telah siap memanen hasil budidaya keramba yang dilakukan, namun jumlah ikan yang akan dipanen berkurang sangat banyak dibanding saat penebaran bibit sekitar

9 bulan sebelumnya. Pokmas Keramba Mandiri misalnya, hanya dapat memanen 50 ekor dari 600 bibit yang diberikan pada awal masa tanam. Satu pokmas uji coba terakhir yaitu Pokmas Usaha Bersama (Air Saga) tidak dapat meneruskan kegiatan, sebab pengurus LPSTK Pulau Abang menarik seluruh bantuan bibit dan alat yang telah diberikan kepada pokmas ini dan mengalihkannya pada pokmas lain. Penarikan bantuan dilakukan karena pihak pengurus LPSTK menilai bahwa anggota kelompok memiliki itikad kurang baik dalam pengelolaan kegiatan pokmas tersebut.

Dua pokmas industri pengolahan pada tahap uji coba awalnya memiliki jenis kegiatan yang sama yaitu usaha pembuatan kerupuk ikan. Pemilihan jenis kegiatan ini ditentukan oleh pihak Coremap dan anggota pokmas diberikan pelatihan produksi kerupuk ikan. Pokmas Bunga Tanjung I dan Pokmas Mawar Merah memulai usahanya pada tahun 2006 setelah memperoleh bantuan berupa uang dan alat-alat. Dalam pelaksanaan kegiatannya, kedua pokmas ini sering mengalami kerugian ataupun kegagalan produksi. Hal ini dipengaruhi oleh persaingan pasar dan kondisi musim yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian dan habisnya modal usaha (Romdiati dan Noveria, 2007).

Pokmas Bunga Tanjung sulit melanjutkan kegiatan produksinya akibat seringnya mengalami kegagalan produksi, contohnya pada saat musim penghujan ketika adonan yang sudah dipotong-potong menjadi kerupuk tidak bisa dikeringkan. Pokmas ini telah melakukan produksi pembuatan kerupuk sebanyak enam kali dan selalu mengalami kerugian dalam pemasaran hasil produksinya. Hal ini karena harga jual kerupuk yang murah dan disamakan dengan harga kerupuk yang diproduksi oleh industri besar di Pulau Abang. Harga jual yang selama ini diberlakukan dapat menghasilkan keuntungan jika kerupuk diproduksi dalam skala besar, tetapi hal itu tidak berlaku untuk pokmas jender yang memproduksi kerupuk dalam jumlah sedikit. Ketika kegiatan produksi telah berjalan sekitar setahun, modal usaha yang tersisa telah berkurang, yaitu dari jumlah modal awal Rp. 300.000,- menjadi Rp. 170.000,- (Romdiati & Noveria, 2007). Saat ini, Pokmas Bunga Tanjung I

menghentikan kegiatan produksinya akibat adanya kenaikan harga bahan baku. Produksi hanya dilakukan jika ada pesanan kerupuk ikan (Yayasan Laksana Samudera, 2008).

Hal yang berbeda terjadi pada Pokmas Mawar Merah. Setelah beberapa bulan memulai usaha pembuatan kerupuk ikan, pada bulan November 2007 pokmas yang beranggotakan 5 orang ini akhirnya memutuskan untuk mengganti jenis kegiatan MPA yang mereka lakukan menjadi usaha pembuatan telur asin (wawancara dengan salah seorang anggota pokmas). Peralihan kegiatan pokmas ini dilakukan tanpa sepengetahuan pihak Coremap, namun mendapatkan persetujuan dari penyuluh. Oleh karena itu, tidak ada bimbingan teknis yang diberikan seperti halnya pada kegiatan pembuatan kerupuk ikan sebelumnya. Pokmas ini melakukan kegiatan produksi tiap 2 minggu. Dalam sekali produksi, pokmas membutuhkan 5 papan (150 butir) telur 5 kg dan garam. Telur yang diasinkan adalah telur ayam, dengan pertimbangan penghematan biaya produksi. Pada akhir tahun 2008, usaha ini mulai sering mengalami kerugian sehingga anggota pokmas memutuskan berhenti berproduksi untuk sementara dan akan dimulai lagi setelah mendapat kucuran modal berikutnya.

Pasar hasil produksi pokmas telur asin ini terbatas hanya di Pulau Abang, sebab pemasaran ke daerah lain tidak mungkin dilakukan karena adanya kompetitor usaha serupa yang menawarkan harga lebih murah dan kualitas telur asin yang lebih baik (telur bebek). Penjualan hasil produksi telur asin dilakukan dengan menitipkan ke warung-warung setempat, biasanya sekitar 30 butir telur per warung. Pokmas mendapatkan rata-rata keuntungan bersih sekitar Rp. 40.000,- per 2 minggu, setelah menyisihkan 20 persen hasil penjualan telur untuk pemilik warung. Keuntungan ini tidak langsung dibagikan, namun dikumpulkan terlebih dahulu. Pembagian hasil usaha dilakukan pada waktu tertentu yang disepakati anggota pokmas. Bagi hasil pertama yang dilakukan pokmas ini dilakukan menjelang Lebaran tahun 2008. Dari seluruh anggota pokmas, hanya 2 orang yang aktif bekerja dalam kegiatan pembuatan telur asin, sehingga kedua orang tersebut memperoleh porsi bagi hasil

yang lebih besar (masing-masing sekitar 40 persen dari seluruh keuntungan bersih) dan 20 persen sisanya dibagikan pada 3 orang anggota non aktif (wawancara dengan narasumber anggota pokmas pembuatan telur asin di Pulau Abang).

Pengembalian dana pinjaman pada tahap uji coba telah dilakukan oleh pokmas ini sebesar Rp. 767.000,- pada akhir tahun 2008. Untuk tahun 2009, Pokmas Mawar Merah mengajukan usulan kegiatan berupa pembuatan telur asin dan jual beli pakaian dengan permintaan pinjaman sebesar Rp 8.000.000,-. Pengajuan jenis usaha baru (jual beli pakaian) oleh anggota pokmas dilakukan berdasar asumsi bahwa usaha ini memiliki prospek pengembangan yang cukup bagus, terutama jika menjelang hari raya. Selain itu, anggota pokmas menganggap kedua jenis usaha ini dapat saling mendukung dalam hal pengadaan bahan baku. Ketika anggota pokmas berbelanja pakaian yang akan diperdagangkan di Kota Batam atau Tanjung Pinang, mereka juga sekaligus bisa berbelanja telur secara grosir. Hal ini diharapkan dapat menekan biaya produksi sehingga kelak keuntungan yang diperoleh juga meningkat. Meskipun demikian, pengajuan usulan untuk usaha jual beli pakaian ini terkendala karena adanya aturan tentang pengusulan kegiatan MPA, antara lain harus terkait dengan usaha produksi dengan bahan baku sumberdaya yang tersedia di lingkungan sekitar.

Salah seorang anggota Pokmas Mawar Merah juga mengajukan pinjaman individu⁴ kepada LPSTK Pulau Abang yang digunakan sebagai modal usaha pembuatan es lilin. Pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- ini mengatasnamakan kelompok yang terdiri dari dua orang, sehingga masing-masing memperoleh Rp.500.000,-. Pengembalian pinjaman

⁴ Selain kegiatan MPA yang dilakukan secara berkelompok, di Kelurahan Pulau Abang juga diberikan pinjaman modal usaha untuk individu. Pinjaman individu diberikan kepada mereka yang sebelumnya telah memiliki usaha produktif, tapi berkeinginan untuk menambah modal usaha. Dana pinjaman tersebut dikelola oleh LPSTK, berasal dari uang pengembalian modal usaha dari pokmas-pokmas yang sudah panen, seperti pokmas KJT.

individu ini dapat diangsur sebesar Rp 100.000,- selama 12 bulan. Saat ini, pengembalian angsuran oleh kedua orang tersebut telah terhenti selama 3 bulan. Hal ini disebabkan salah seorang peminjam belum dapat membayar angsuran, sementara LPSTK tidak dapat menerima pengembalian satu orang saja sebab pinjaman ini mengatasnamakan kelompok.

Pinjaman individu juga digunakan oleh salah seorang masyarakat di Pulau Abang untuk menambah modal usaha yang telah lama dilakukan yaitu berjualan lontong. Pengajuan pinjaman sebesar Rp. 3.000.000,- dilakukan dalam rangka menghadapi kenaikan biaya produksi akibat terjadinya kenaikan harga bahan baku. Oleh karena itu, pinjaman yang diperoleh belum dapat membantu untuk meningkatkan produksi usaha ini karena harga bahan baku yang naik tajam. Sebagai contoh, dengan jumlah modal yg sama, sebelumnya usaha ini dapat memproduksi 12 buah lontong, namun setelah terjadi kenaikan harga bahan baku, usaha ini hanya dapat memproduksi 8 buah lontong. Contoh lainnya, sebelum kenaikan harga bahan pokok, keuntungan bersih yang bisa didapatkan sekitar Rp. 500.000,-/bulan, namun saat ini hanya mencapai Rp. 250.000,- . Turunnya pendapatan bersih dari usaha ini mulai dirasakan sekitar 2 tahun lalu ketika mulai terjadi kenaikan harga BBM.

2.1.2. Partisipasi dan Manfaat

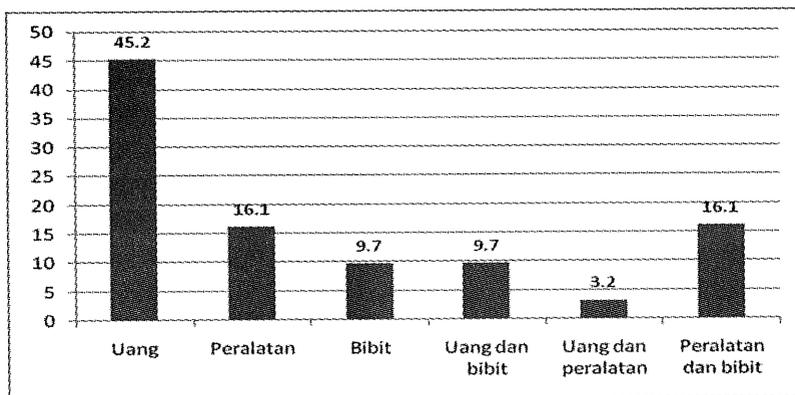
Partisipasi masyarakat Kelurahan Pulau Abang dalam kegiatan MPA yang digulirkan oleh Coremap dikelompokkan dalam 2 kategori yaitu penerima bantuan dalam kelompok masyarakat (pokmas) dan penerima bantuan individu. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kelurahan Pulau Abang yang berjumlah 1.600 jiwa (Kelurahan Galang dalam Angka, 2007), proporsi penduduk yang berpartisipasi dalam kegiatan MPA ini tidak terlalu besar. Hal ini dapat dicermati dari jumlah pokmas aktif di bawah koordinasi LPSTK Pulau Abang yang hanya sebanyak 19 kelompok (Yayasan Laksana Samudera, 2008), dengan jumlah rata-rata anggota pokmas sekitar 5-7 orang. Penerima bantuan

individu yang digulirkan LPSTK setempat juga baru mencapai sekitar 9 orang pada tahap pertama pengguliran dana individu.

Hasil survei BME Coremap tahun 2009 di Kelurahan Pulau Abang memperlihatkan sekitar 28,7 persen responden menerima bantuan untuk kegiatan MPA, baik melalui pokmas maupun bantuan yang bersifat individu. Bantuan yang diterima bervariasi bentuknya, seperti terlihat pada Gambar 2.1. Proporsi terbesar adalah mereka yang menerima bantuan uang, sementara yang terkecil adalah penerima bantuan uang dan peralatan. Bantuan berupa uang pada umumnya diterima oleh mereka yang melakukan aktifitas perdagangan dan industri rumah tangga, yang umumnya berskala kecil. Selanjutnya, empat jenis bantuan lainnya hanya didapat oleh mereka yang tergabung dalam pokmas yang melakukan kegiatan MPA, yaitu budidaya ikan menggunakan KJA (keramba jaring apung) atau KJT (keramba jaring tancap) serta pembuatan kerupuk ikan.

Gambar 2.1

Distribusi Responden Penerima Bantuan Kegiatan MPA Coremap Menurut Jenis Bantuan, Kelurahan Pulau Abang, 2009, (%)



Sumber : Survei BME Sosial Ekonomi, PPK LIPI, 2009.

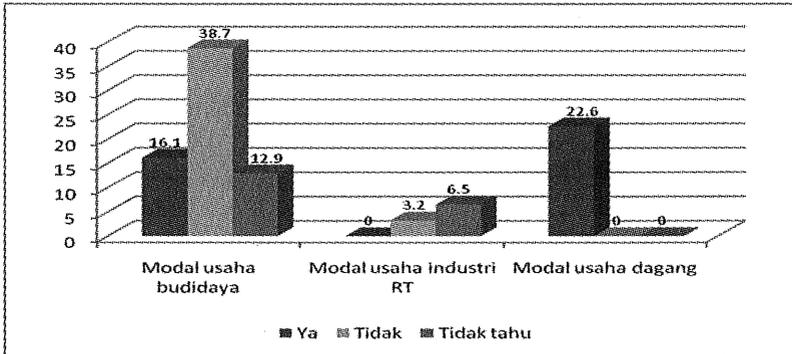
Berdasarkan hasil survei, bantuan yang diterima oleh masyarakat Kelurahan Pulau Abang digunakan sebagai modal untuk berbagai jenis usaha. Proporsi terbesar bantuan yang diterima digunakan oleh responden untuk modal usaha budidaya (44,4 persen). Selain itu, dana bantuan tersebut juga digunakan oleh responden untuk modal usaha dagang (38,9 persen) dan modal usaha industri rumah tangga (16,7 persen).

Hampir sebagian dari penerima bantuan pokmas maupun individu (41,9 persen) berpendapat bahwa bantuan yang mereka terima sampai saat ini tidak dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga mereka. Sekitar 38,7 persen responden lainnya yang menerima bantuan serupa memiliki pendapat berbeda yaitu bantuan yang mereka terima dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga, sedangkan sisa responden penerima bantuan lainnya (19,4 persen) tidak tahu apakah bantuan tersebut dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga mereka.

Jika dicermati menurut jenis usahanya, terdapat kecenderungan bahwa mayoritas responden yang menjawab bantuan tersebut tidak berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga adalah mereka yang melakukan usaha kegiatan budidaya perikanan. Di lain pihak, semua responden penerima bantuan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan berpendapat bahwa bantuan tersebut dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga mereka (Gambar 2.2). Peningkatan pendapatan rumah tangga yang dirasakan oleh responden penerima bantuan Coremap yang melakukan kegiatan perdagangan dapat mengindikasikan meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat sehingga mempengaruhi tingginya aktivitas perdagangan di wilayah ini. Selain itu, budaya masyarakat setempat yang cukup konsumtif juga turut mendorong peningkatan volume perdagangan di wilayah ini, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan responden yang bekerja di bidang perdagangan.

Gambar 2.2

Distribusi Responden Penerima Bantuan Kegiatan MPA Coremap Menurut Penggunaan Bantuan dan Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga, Kelurahan Pulau Abang, 2009 (%).



Sumber : Survei BME Aspek Sosial Ekonomi, PPK-LIPI, 2009.

Responden mengemukakan bahwa dana bantuan Coremap tidak dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga karena beberapa alasan. Alasan-alasan tersebut antara lain usaha yang mereka lakukan belum menghasilkan (30,8 persen), mengalami kerugian (30,8 persen) dan usaha yang dilakukan mengalami kegagalan (38,5 persen). Usaha yang belum menghasilkan umumnya adalah usaha budidaya perikanan yang baru dimulai pada tahun 2008 dan belum memasuki masa panen, sehingga para anggota pokmas belum bisa merasakan pengaruh dari kegiatan MPA yang mereka lakukan terhadap pendapatan.

Responden yang usahanya mengalami kerugian atau kegagalan pada umumnya adalah mereka yang melakukan kegiatan budidaya perikanan. Kerugian ataupun kegagalan usaha pada umumnya terjadi karena banyaknya bibit ikan yang mati akibat terserang penyakit ataupun yang keluar dari jaring keramba pada awal musim penanaman. Hal ini mengakibatkan jumlah ikan yang dipanen sangat jauh berkurang dari jumlah bibit yang ditebar di awal musim. Pada kegiatan MPA industri

rumah tangga, kerugian atau kegagalan usaha yang dialami utamanya dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan baku. Meroketnya harga bahan baku industri rumah tangga sangat dirasakan ketika terjadi kenaikan harga BBM mulai tahun 2005. Ketidakstabilan harga BBM tersebut berpengaruh terhadap kenaikan harga bahan-bahan pokok yang menjadi bahan baku utama dalam kegiatan industri rumah tangga ini.

2.1.3. Permasalahan dan Kendala

Berdasarkan jenis usahanya, penerima dana bantuan dari Coremap II dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok besar, yaitu kegiatan usaha budidaya perikanan, kegiatan usaha industri rumah tangga, dan kegiatan usaha perdagangan. Perbedaan jenis usaha ini juga melahirkan perbedaan jenis permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh tiap pokmas atau individu yang menerima dana bantuan kegiatan MPA Coremap II.

Kegiatan budidaya perikanan merupakan kegiatan usaha yang paling banyak dilakukan oleh penerima bantuan dana Coremap II, melalui kegiatan MPA keramba jaring apung (KJA) dan keramba jaring tancap (KJT). Meskipun begitu, jenis usaha ini juga memiliki tingkat kegagalan yang cukup tinggi. Permasalahan utama yang mendasari cukup seringnya terjadi kegagalan usaha budidaya perikanan di Kelurahan Pulau Abang adalah sebagian besar anggota pokmas belum memahami dengan baik prinsip-prinsip usaha budidaya perikanan. Kegiatan budidaya perikanan merupakan jenis usaha yang membutuhkan kecermatan dan ketekunan para anggotanya untuk memelihara ikan dan sangat berbeda sistem kerjanya dibandingkan dengan kegiatan perikanan tangkap yang dilakukan oleh hampir seluruh nelayan di Pulau Abang.

Kurangnya pemahaman anggota pokmas mengenai cara budidaya perikanan yang benar tersebut pada akhirnya memunculkan berbagai kendala dalam pengelolaan kegiatan budidaya perikanan di Pulau Abang, baik kendala teknis maupun kendala non teknis. Kendala teknis yang dihadapi terkait dengan kondisi perairan setempat serta pengadaan

bibit dan pemberian obat-obatan. Kondisi perairan di sekitar Pulau Abang memiliki arus yang kurang bagus untuk budidaya perikanan, khususnya budidaya kerapu macan. Oleh karena itu diperlukan penanganan keramba yang lebih intensif dalam mengatasi hambatan dari kondisi alam tersebut.

Meskipun para anggota pokmas di Pulau Abang telah memperoleh pelatihan pengelolaan keramba, namun kendala teknis berupa penyediaan bibit dan perawatan ikan masih sering terjadi dalam kegiatan pokmas. Kondisi bibit yang terlalu kecil yang diserahkan kepada pokmas pada awal masa penyebaran bibit membuat berkurangnya jumlah ikan secara signifikan pada bulan-bulan pertama kegiatan budidaya. Ukuran bibit yang kecil tidak sebanding dengan besarnya lubang pada jaring keramba yang digunakan, sehingga banyak bibit ikan yang lolos atau keluar dari jaring. Selain itu, cukup banyak ikan yang terkena penyakit terutama ikan yang berukuran besar. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya perhatian dalam pemeliharaan ikan, misalnya pemberian vitamin dan obat-obatan serta pencucian ikan yang harus rutin dilaksanakan. Kondisi ini utamanya terjadi ketika usaha budidaya keramba ini masih dalam tahap uji coba.

Kendala non teknis yang dihadapi dalam pengelolaan budidaya keramba di Pulau Abang terkait dengan etos kerja anggota pokmas. Ketekunan dan kesabaran yang dibutuhkan dalam kegiatan budidaya perikanan ini belum banyak disadari oleh kebanyakan anggota pokmas MPA KJA maupun KJT. Hal ini terlihat dari banyaknya anggota pokmas yang menyatakan mundur dari kegiatan usaha pokmas ketika melihat bibit ikan yang datang pada awal usaha budidaya. Ukuran bibit yang sangat kecil membuat banyak anggota pokmas yang berpikir bahwa usaha budidaya ini tidak mungkin akan berhasil sebab bibit sekecil itu mustahil dapat dikembangkan dan dapat memberikan keuntungan ekonomi.

Selain itu, nelayan setempat telah terbiasa dengan sistem kerja yang dapat langsung menerima uang penjualan hasil tangkapan dalam waktu yang singkat. Ketika dihadapkan dengan sistem kerja budidaya perikanan yang membutuhkan waktu berbulan-bulan sebelum dapat menikmati

hasilnya, para nelayan yang menunjukkan minat cukup tinggi pada awal kegiatan mulai merasa bosan dengan rutinitas kegiatan budidaya ini. Para nelayan setempat menganggap usaha budidaya ikan ini hanya membuang-buang waktu dan tidak dapat memberikan keuntungan ekonomi yang lebih baik dibandingkan kegiatan kenelayanan yang telah biasa mereka lakukan, sehingga memutuskan untuk tidak aktif atau mundur dari keanggotaan pokmas.

Kultur bekerja berkelompok menjadi kendala lain dalam pelaksanaan usaha budidaya perikanan, sebab kegiatan berkelompok seperti ini tidak biasa dilakukan oleh penduduk setempat. Pekerjaan kenelayanan yang lebih bersifat individual membuat masyarakat setempat tidak terbiasa dengan kultur kerja budidaya perikanan yang membutuhkan kerjasama antar anggota kelompok. Hal ini yang membuat konflik antar anggota pokmas cukup sering terjadi, terutama dalam hal manajemen keuangan pokmas. Potensi konflik ini sebenarnya telah diantisipasi sebelumnya dengan ditetapkannya ketentuan bahwa anggota pokmas harus berjumlah ganjil. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi jika terjadi *deadlock* ketika ada konflik atau perbedaan pendapat antar anggota yang membutuhkan solusi pengambilan keputusan melalui pemilihan suara terbanyak. Meskipun demikian, kecurigaan mengenai tidak meratanya proporsi uang operasional ataupun hasil keuntungan yang dibagikan antar anggota merupakan masalah yang tetap sering muncul dalam pengelolaan budidaya keramba di lokasi ini. Pada akhirnya konflik antar anggota yang terjadi ini menurunkan kinerja kegiatan budidaya pokmas tersebut.

Hambatan khusus yang dialami oleh anggota pokmas budidaya ikan yang telah memasuki masa panen di wilayah Pulau Abang adalah sulitnya mendapatkan harga yang bagus ketika panen. Terjadinya fluktuasi harga ikan yang mengikuti hukum permintaan dan penawaran, menyebabkan turunnya harga ikan ketika jumlah ikan melimpah. Harga ikan yang bagus pada awal penanaman bibit ikan ataupun selama musim tanam tidak selalu bisa bertahan sampai dengan musim panen ikan. Hal ini berpotensi menurunkan semangat anggota pokmas untuk

berusaha lagi di musim berikutnya, sebab penjualan hasil panen sebelumnya tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Untuk mengatasi kendala tersebut.

Permasalahan pengelolaan kegiatan MPA juga dialami oleh jenis usaha industri rumah tangga. Kegiatan industri rumah tangga yang berada di bawah koordinasi LPSTK Pulau Abang antara lain terdiri dari pembuatan kerupuk ikan, pembuatan telur asin dan pembuatan kerajinan kerang-kerangan. Kendala yang dihadapi oleh jenis usaha ini umumnya terkait dengan ketersediaan bahan baku, kesulitan pemasaran, serta fluktuasi harga yang mempengaruhi jalannya produksi kegiatan usaha tersebut. Selain itu, ada pula beberapa faktor non teknis yang dihadapi dalam kegiatan industri rumah tangga, terutama yang dilakukan oleh pokmas.

Kendala yang dihadapi oleh pokmas pembuatan kerupuk ikan bervariasi, seperti kesulitan pengadaan bahan baku dan proses pengeringannya yang sangat tergantung pada sinar matahari, kenaikan harga bahan pokok ataupun konflik yang terjadi antar anggota pokmas. Selain itu, terhambatnya pengembangan kegiatan pokmas ini terkait dengan pemasaran hasil produksi. Di Pulau Abang sebelumnya telah ada industri pembuatan kerupuk ikan lainnya yang tergolong dalam industri besar. Kerupuk ikan produksi pokmas Coremap kalah bersaing di pasar dengan kerupuk hasil industri besar tersebut.

Industri pembuatan kerupuk ikan menghadapi kendala ketika produksi ikan yang digunakan sebagai bahan baku sangat sedikit, terutama pada musim selatan dan utara. Pengadaan bahan baku industri kerupuk ikan juga bersaing dengan pengadaan pakan untuk usaha budidaya keramba, sebab kedua jenis usaha ini menggunakan jenis ikan yang sama. Berbeda dengan industri pembuatan kerupuk ikan yang telah ada sebelumnya di Pulau Abang yang tidak perlu membeli ikan karena industri tersebut memiliki pukat sendiri, industri pembuatan kerupuk ikan oleh pokmas Coremap harus membeli bahan baku ikan tamban pada nelayan. Kegiatan pokmas ini terpengaruh ketika harga ikan tamban meningkat, sehingga semakin memberatkan biaya produksi industri rumah tangga tersebut. Tidak hanya kenaikan harga ikan

tambahan, para anggota pokmas juga menghadapi kendala akibat kenaikan harga bahan-bahan lain yang digunakan seperti tepung dan minyak tanah, sehingga semakin menambah biaya produksi.

Dalam industri pembuatan telur asin, kesulitan bahan baku yang dihadapi terutama dalam pengadaan bahan baku telur yang akan diasinkan. Tidak seperti telur asin yang umumnya terbuat dari telur bebek, industri telur asin di Pulau Abang menggunakan telur ayam. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan harga telur ayam lebih murah dibandingkan dengan harga telur bebek. Meskipun begitu, kegiatan industri ini mulai banyak mengalami kerugian ketika harga telur ayam mulai merambat naik yang disertai dengan penurunan kualitas telur yang akan diasinkan. Keterbatasan skala produksi industri rumah tangga ini juga membuat belanja bahan baku tidak mungkin dilakukan secara grosir yang sebenarnya dapat menekan harga pembelian bahan baku. Selain itu, pembelian telur secara grosir mengharuskan anggota pokmas ini untuk berbelanja ke pasar di kota besar terdekat dengan lokasi ini (Tanjung Pinang atau Batam), sebab tidak ada pasar di Kelurahan Pulau Abang. Hal ini tentunya akan mengakibatkan tingginya biaya transportasi yang digunakan dan tidak sebanding dengan jumlah keuntungan yang didapatkan. Kendala aksesibilitas tersebut akhirnya memaksa anggota pokmas berbelanja harga baku di kedai yang berada di pulau tersebut.

Industri kerajinan yang dilakukan di Pulau Abang juga menghadapi kesulitan dalam pengadaan bahan baku. Bahan baku berupa kerang-kerangan yang diproduksi menjadi gantungan kunci tidak tersedia sepanjang waktu di lokasi ini, sehingga menyulitkan kelangsungan kegiatan produksi. Kesulitan penyediaan bahan baku ini akhirnya menyebabkan tersendatnya proses produksi sehingga membuat banyak anggota yang enggan berperan aktif dalam kegiatan industri kerajinan kerang-kerangan di lokasi ini.

Selain kesulitan dalam penyediaan bahan baku, kendala lain yang dihadapi dalam kegiatan usaha industri rumah tangga di Pulau Abang adalah kesulitan pemasaran hasil produksi. Seperti telah dikemukakan

sebelumnya, industri pembuatan kerupuk ikan mengalami kesulitan ketika memasarkan hasil produksinya, terutama ketika berhadapan dengan industri pembuatan kerupuk ikan lain yang telah terlebih dahulu ada di Pulau Abang sebelumnya. Industri pembuatan kerupuk ikan yang telah ada memiliki skala produksi yang lebih besar, serta teknik pengolahan serta sistem pengemasan yang lebih baik dibandingkan kegiatan pembuatan kerupuk ikan yang dilakukan oleh pokmas MPA di Pulau Abang. Ketertinggalan dalam hal teknologi produksi inilah yang membatasi lingkup pemasaran hasil produksi pokmas pembuatan kerupuk ikan ini. Padahal untuk bisa menjangkau pasar yang lebih luas, perlu diperhatikan standarisasi pemasaran, misalnya kemasan, *barcode*, standar kesehatan (ijin Departemen Kesehatan), sertifikat halal, komposisi, aspek rasa dan penampilan, serta ijin POM (Pengawasan Obat dan Makanan) (Yayasan Laksana Samudera, 2008).

Kendala hampir serupa juga dihadapi oleh industri pembuatan telur asin di Pulau Abang. Pemasaran hasil produksi usaha ini yang hanya terbatas di Pulau Abang. Perluasan wilayah pemasaran belum memungkinkan untuk dilakukan oleh anggota pokmas, sebab di pulau lain di sekitar Pulau Abang terdapat juga industri serupa dengan harga yang lebih murah dan kualitas telur lebih baik. Selain itu, pokmas ini juga mengalami permasalahan mengenai kinerja anggota kelompok. Pada awalnya, kelima anggota pokmas ini ikut aktif dalam kegiatan pembuatan telur asin, namun pada suatu waktu terjadi konflik antar anggota akibat adanya kesalahpahaman antar anggota kelompok tertentu, yang pada akhirnya membuat hanya 2 orang yang aktif dalam kegiatan pokmas ini sekarang.

Kendala yang dihadapi industri pembuatan kerajinan kerang-kerangan adalah belum adanya pasar yang memadai bagi hasil produksi pokmas ini. Keterbatasan pemasaran ini terutama disebabkan kualitas produk yang masih belum layak jual, sehingga menyulitkan pengembangan lokasi pemasaran yang lebih luas. Akibatnya, masih banyak hasil produksi industri kerajinan ini yang belum terjual dan dibiarkan begitu saja oleh anggota pokmas yang bersangkutan.

Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM yang beberapa kali dilakukan sejak tahun 2005, turut pula menjadi kendala dalam pengelolaan industri rumah tangga di Kelurahan Pulau Abang. Kenaikan harga BBM yang terjadi sampai tiga kali dalam kurun waktu tahun 2005-2008, meskipun diikuti dengan penurunan harga BBM pada akhir 2008 dan awal 2009, sangat mempengaruhi ketidakstabilan harga bahan-bahan pokok yang menjadi bahan baku dalam usaha industri pengolahan. Hal ini tentunya akan menambah biaya operasional produksi dan dapat mengurangi potensi keuntungan usaha yang dijalankan. Di lain pihak, daya beli masyarakat setempat yang rendah membuat pokmas sulit menaikkan harga hasil produksinya. Anggota pokmas khawatir jika mereka menaikkan harga maka hasil produksi mereka tidak laku lagi dan usaha yang mereka jalankan akan merugi. Kondisi ini membuat anggota pokmas enggan melanjutkan kegiatan produksi industri mereka karena keuntungan yang diperoleh relatif kecil. Mereka hanya melakukan kegiatan produksi jika ada pesanan khusus dari konsumen.

Kegiatan usaha perdagangan memiliki kendala hampir serupa dengan usaha industri pengolahan yang dilaksanakan di Pulau Abang. Jenis usaha yang dilakukan oleh pokmas maupun individu ini menghadapi permasalahan pada penyediaan pasokan bahan dagangan serta rendahnya daya beli masyarakat setempat. Permasalahan pasokan barang dagangan yang terjadi di pulau ini sangat terkait dengan permasalahan aksesibilitas di Pulau Abang. Salah satu contoh kesulitan penyediaan barang dagangan ini dialami oleh pokmas kios BBM. Meskipun usaha MPA ini telah menerima kucuran dana dari pihak Coremap II, namun LPSTK setempat belum dapat mencairkan dana tersebut kepada pokmas pengusul MPA. Hal ini terutama terkait karena faktor kesulitan dalam memperoleh minyak di Pulau Abang. Kelangkaan BBM yang sangat sering terjadi di Pulau Abang dan belum adanya distributor yang bisa memasok BBM di wilayah tersebut menjadi penyebab terhambatnya kegiatan usaha perdagangan kios BBM.

Contoh lainnya adalah pokmas kedai pesisir yang juga mengalami kesulitan dalam pengadaan barang dagangan. Kedai pesisir yang ingin dikembangkan di Pulau Abang adalah konsep warung yang menjual barang kebutuhan sehari-hari secara eceran dengan harga grosir. Mahalnya biaya transportasi untuk pengadaan barang dagangan menyebabkan konsep awal pengembangan kedai pesisir tersebut sulit diwujudkan.

2.2. PROGRAM BANTUAN FISIK DESA/KELURAHAN

Bantuan dana yang diberikan Coremap mencakup pembiayaan untuk beragam kegiatan, baik yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan upaya pelestarian dan pengelolaan terumbu karang. Bantuan untuk kegiatan yang terkait langsung dengan upaya tersebut antara lain dana untuk pengadaan sarana dan fasilitas pengawasan terumbu karang, seperti pembelian kapal dan mesinnya yang diperlukan dalam kegiatan patroli laut oleh pokmas pengawasan. Selain itu, juga bantuan modal untuk mengembangkan kegiatan mata pencaharian alternatif untuk mengurangi ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya laut yang berpotensi menimbulkan kerusakan terumbu karang.

Bantuan yang tidak terkait langsung dengan upaya pengelolaan terumbu karang antara lain berupa dana untuk pembangunan fisik desa/kelurahan lokasi Coremap. Dana tersebut dapat digunakan untuk pembangunan di lokasi, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas, tidak hanya terbatas pada mereka yang terlibat dalam kegiatan Coremap. Kegiatan pembangunan fisik desa/kelurahan yang dibiayai dengan dana bantuan Coremap direncanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan disinergikan dengan kegiatan pembangunan desa pada umumnya. Dengan demikian, kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat saling mendukung agar dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Sub bab ini membahas pelaksanaan program bantuan fisik yang diberikan Coremap di Kelurahan Pulau Abang. Pembahasan mencakup jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan dan mekanisme pelaksanaannya,

termasuk proses dan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari program pembangunan fisik kelurahan atas bantuan Coremap juga dibahas pada bagian ini.

2.2.1. Jenis Kegiatan dan Proses Pelaksanaan

Rencana Pengelolaan Terumbu Karang atau RPTK memuat berbagai permasalahan dan isu yang berkembang di tiap kelurahan, baik isu ekologis maupun isu sosial ekonomi, juga memuat berbagai usulan kegiatan yang diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat setempat. Dalam RPTK Kelurahan Pulau Abang, berbagai usulan kegiatan tersebut disusun dalam matriks rencana kegiatan selama lima tahun (2005-2009) dengan target capaian pembangunan yang rinci pada tiap tahunnya. Selain pengembangan mata pencaharian alternatif melalui pembentukan pokmas, dalam penyusunan RPTK masyarakat juga diminta untuk menyusun rencana pembangunan kelurahan melalui usulan pembangunan sarana dan prasarana sosial yang sesuai dengan kebutuhan tiap lokasi (Yayasan Laksana Samudera, 2007). Usulan pembangunan sarana dan prasarana sosial ini kemudian diwujudkan dalam program bantuan fisik desa yang digulirkan oleh Coremap II. Program ini telah rutin digulirkan setiap tahunnya di Kelurahan Pulau Abang mulai tahun 2006.

Berbagai usulan pembangunan sarana dan prasarana fisik desa yang diajukan dalam RPTK Kelurahan Pulau Abang merujuk pada beragam permasalahan dan isu sosial ekonomi yang berkembang di wilayah tersebut. Isu-isu tersebut antara lain masih kurangnya infrastruktur dan fasilitas sosial, sulitnya air bersih dan lemahnya kesadaran masyarakat tentang penanganan sampah dan kondisi kesehatan masyarakat setempat. (LPSTK Kelurahan Pulau Abang, 2007). Dalam rangka mengakomodasi berbagai permasalahan sosial tersebut, diajukan beberapa jenis pembangunan fisik yang dibutuhkan masyarakat, yang dikelompokkan berdasarkan wilayah damping atau lokasi di bawah koordinasi LSPTK Pulau Abang.

Berdasarkan dokumen RPTK Kelurahan Pulau Abang, kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana sosial di lokasi Pulau Abang meliputi pembangunan pelabuhan, sarana air bersih, pipanisasi air, ruang pertemuan, pangkalan minyak dan pembuatan jalan lingkaran menuju Air Saga. Kebutuhan sarana dan prasarana sosial di lokasi Air Saga meliputi pembangunan sumber air bersih, penambahan jalan kampung, rehabilitasi mushola, pembangunan pabrik es mini serta pembangunan dermaga. Pembangunan fisik yang dibutuhkan di Pulau Petong terdiri dari pembuatan jalan kampung, pembangunan dermaga, sumber air bersih, pipanisasi sumber air, mesin listrik dan pabrik es. Selain itu juga tercatat strategi peningkatan kesehatan masyarakat melalui kegiatan pembangunan sumur air minum serta pembuatan tempat pembuangan dan pembakaran sampah.

Realisasi berbagai usulan masyarakat dalam RPTK tersebut dilakukan secara bertahap tiap tahunnya. Di awal pelaksanaan kegiatan bantuan fisik desa pada tahun 2006, dilakukan pembangunan dermaga di Pulau Abang serta pembangunan *info centre* atau pondok informasi di Pulau Abang dan Pulau Petong. Pada tahun 2007, jumlah kegiatan bantuan fisik desa bertambah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain pembangunan pondok informasi di Air Saga, dilakukan juga pembangunan dermaga dan pelantar di Pulau Petong, sarana air bersih di Pulau Abang, fasilitas MCK dan pembuatan tong sampah di Pulau Abang, Air Saga serta Pulau Petong. Sayangnya pada tahun 2008, bantuan pembangunan fisik desa ini hanya digunakan untuk satu kegiatan yaitu pelebaran pondok informasi di Pulau Abang. Jenis dan jumlah kegiatan yang dilakukan di lokasi pendampingan Coremap tersebut sangat bergantung dari keputusan yang dikeluarkan oleh pihak Coremap Kota Batam, yang dalam hal ini dikoordinasi oleh Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Pemerintah Kota Batam (hasil wawancara dengan seorang narasumber pengurus LPSTK Pulau Abang).

Sampai saat penelitian ini dilakukan, kegiatan bantuan pembangunan fisik di tahun 2009 baru sampai pada tahap sosialisasi surat keputusan

yang dikeluarkan Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Pemerintah Kota Batam tentang daftar kegiatan di lokasi Coremap II yang akan dilakukan pada tiap LPSTK di Kota Batam. Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di Kelurahan Pulau Abang terdiri dari pembangunan pelantar dan ujung T serta perluasan pondok informasi di Pulau Petong; rehabilitasi prasarana sosial, perluasan pondok informasi dan kegiatan rehabilitasi hutan mangrove di Air Saga; serta pembangunan *septic tank communal* dan sanitasi keluarga, pembangunan *traditional homestay*, dan juga pembangunan batu miring di Pulau Abang.

Dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan ataupun rencana kegiatan yang telah disusun di wilayah Kelurahan Pulau Abang, dapat diketahui bahwa jenis kegiatan pembangunan yang terakomodasi melalui mekanisme program bantuan fisik desa ini tidak hanya terbatas pada pembangunan sarana prasarana sosial yang dibutuhkan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan juga mencakup pembangunan yang terkait dengan pelestarian sumber daya perairan di lokasi tersebut yaitu kegiatan rehabilitasi hutan mangrove serta kegiatan pengembangan usaha pariwisata. Hal ini terlihat dari adanya rencana pembangunan *traditional homestay*. Seluruh kegiatan tersebut juga telah termuat dalam usulan kegiatan yang dirumuskan dalam RPTK Kelurahan Pulau Abang.

Selain realisasi usulan kebutuhan pembangunan masyarakat setempat yang tercakup di RPTK, kegiatan bantuan pembangunan fisik yang digulirkan Coremap II juga mencakup pembangunan sarana pendukung operasionalisasi aktivitas pengurus LPSTK dan berbagai pokmas yang berada di bawah koordinasi LPSTK setempat melalui pembangunan pondok informasi. Pondok informasi ini berfungsi sebagai pusat dari segala informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program Coremap II di Kelurahan Pulau Abang, di samping sebagai sekretariat dari berbagai kegiatan LPSTK setempat.

Keterkaitan yang erat antara program bantuan fisik desa dengan program pembangunan desa setempat memerlukan koordinasi yang baik antara pengurus LPSTK dan pemerintah desa setempat. Tidak semua usulan pembangunan fisik desa yang diajukan oleh masyarakat dapat dipenuhi

melalui mekanisme pembiayaan program bantuan fisik desa karena alokasi dana yang terbatas tiap tahunnya. Oleh karena itu, pemerintah kelurahan memiliki kebijakan untuk membawa berbagai usulan yang belum dapat diakomodir melalui bantuan Coremap tersebut ke forum musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) di kelurahan tersebut.

2.2.2. Partisipasi dan Manfaat

Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana desa melalui skema pembiayaan program bantuan fisik desa Coremap II tidak dikoordinir langsung oleh LPSTK setempat. Seperti yang terjadi di Kelurahan Pulau Abang, pelaksanaan pembangunan fisik desa yang dilakukan oleh pihak Coremap melibatkan pihak ketiga yang berperan sebagai kontraktor. Kontraktor inilah yang menjadi penghubung antara pihak Coremap Kota Batam dan LPSTK Kelurahan Pulau Abang. Partisipasi masyarakat setempat dalam proses pembangunan ini hanya terbatas pada pengangkutan bahan bangunan ketika kapal penduduk setempat disewa oleh para kontraktor untuk membawa barang bangunan tersebut dari Kota Batam ataupun sebagai buruh bangunan yang dibayar dengan sistem pengupahan buruh seperti umumnya (wawancara dengan narasumber pengurus LPSTK Pulau Abang).

Berdasarkan hasil survey di Kelurahan Pulau Abang, dari 108 responden rumah tangga, hanya 38 persen responden yang terlibat dalam kegiatan pembangunan fisik di kelurahan ini, yang meliputi pembangunan pondok informasi, dermaga, sarana air bersih/bak penampung air, fasilitas MCK, dan tong sampah. Besar proporsi responden yang tidak terlibat dalam kegiatan pembangunan fisik di Pulau Abang kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti kurangnya sosialisasi LPSTK tentang kegiatan pembangunan fisik pada masyarakat di wilayah ini ataupun akibat rendahnya penyerapan tenaga kerja setempat dalam proses pembangunan tersebut. Selain itu, tidak tertutup pula kemungkinan hal ini terjadi karena ketidakpedulian masyarakat terhadap kegiatan tersebut. Pembangunan fisik desa ini dilakukan oleh pihak

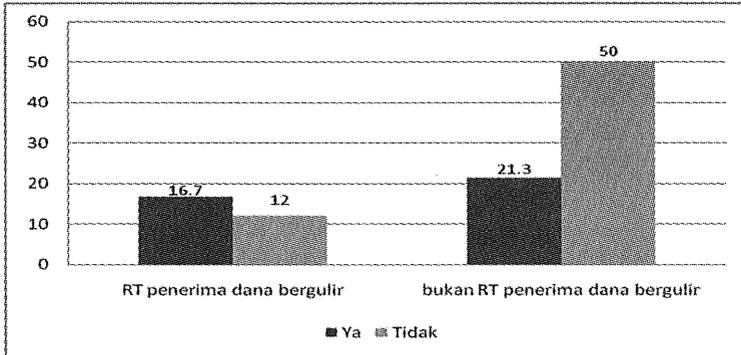
ketiga dan mereka sendiri yang melakukan perekrutan tenaga kerja. Oleh karena itu banyak masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pembangunan fisik kelurahan tidak mengetahui jika kegiatan yang mereka lakukan tersebut bagian dari program bantuan fisik desa yang diberikan oleh Coremap II.

Sebagian responden (50 persen) tidak berpartisipasi dalam kegiatan Coremap apapun yang telah dilakukan di Pulau Abang, baik sebagai partisipan dalam kegiatan pembangunan fisik desa ataupun sebagai penerima dana bergulir (Gambar 2.3). Sementara itu, terdapat 21,3 persen responden yang tidak menerima dana bergulir namun ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan fisik kelurahan. Kemungkinan besar, mereka yang terlibat ini merupakan buruh yang dipekerjakan oleh kontraktor dalam pembangunan fisik desa ataupun pengurus LPSTK yang tidak mengajukan pinjaman dana bergulir. Dari 29,7 persen responden yang menerima dana bergulir, terdapat 12 persen yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan fisik. Hal ini dimungkinkan jika anggota rumah tangga yang menerima dana bergulir tersebut adalah perempuan. Penyerapan tenaga kerja dalam pembangunan fisik desa di Pulau Abang ini memang baru terbatas pada tenaga kerja laki-laki.

Meskipun begitu, pada rencana program kerja pembangunan fisik desa tahun 2009, pengurus LPSTK Pulau Abang telah mempunyai kebijakan untuk memberdayakan kaum perempuan di wilayah ini agar dapat turut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan fisik desa. Sebagai contoh, dalam rencana kegiatan rehabilitasi hutan mangrove di Air Saga, motivator desa setempat berupaya untuk memberdayakan para janda dan pemuda yang belum mempunyai pekerjaan tetap. Partisipasi perempuan dalam kegiatan tersebut dimungkinkan sebab tidak diperlukan keahlian khusus seperti pertukangan ataupun konstruksi.

Gambar 2.3

Distribusi Responden Penerima Dana Bergulir Coremap dan Partisipasi Dalam Pembangunan Fisik Desa, Kelurahan Pulau Abang, 2009 (%).



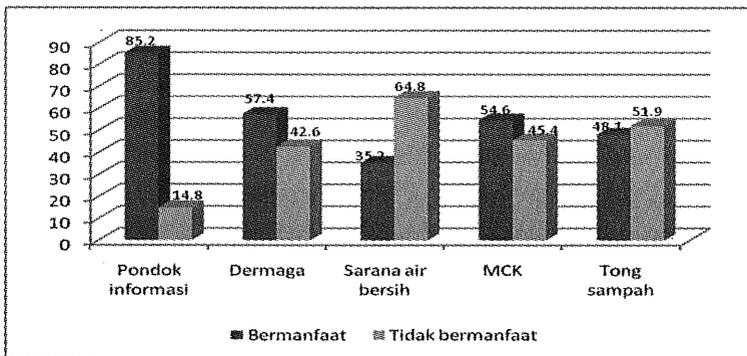
Sumber : Survei BME Sosial Ekonomi COREMAP, PPK-LIPI, 2009.

Meskipun kegiatan pembangunan fisik desa ini hanya melibatkan sebagian kecil masyarakat Pulau Abang, namun hasil dari kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh anggota masyarakat di kelurahan ini. Jika dicermati dari hasil survei, jenis pembangunan fisik yang paling dirasakan manfaatnya oleh responden di Kelurahan Pulau Abang adalah pembangunan pondok informasi, diikuti oleh pembangunan dermaga dan fasilitas MCK. Sementara itu, jenis pembangunan yang paling tidak dirasakan manfaatnya oleh responden adalah pembangunan tong sampah dan sarana air bersih (Gambar 2.4).

Pada kasus di Kelurahan Pulau Abang, bermanfaat atau tidaknya suatu kegiatan pembangunan fisik yang dilakukan sangat bergantung pada persebaran dan pemerataan lokasi tiap kegiatan yang dilakukan. Pembangunan pondok informasi dan fasilitas MCK yang tersebar merata di tiga lokasi pendampingan LPSTK Pulau Abang membuat lebih banyak masyarakat yang merasakan manfaat pembangunan fisik yang dilakukan Coremap. Jenis kegiatan pembangunan lain yang cukup banyak

dirasakan manfaatnya adalah pembangunan dermaga. Meskipun dermaga yang dibangun oleh Coremap hanya berlokasi di Pulau Abang dan Pulau Petong, namun cukup lancarnya akses transportasi darat dari Air Saga ke Pulau Abang, membuat masyarakat Air Saga juga ikut dapat merasakan manfaat keberadaan dermaga di Pulau Abang.

Gambar 2.4
Distribusi Responden Menurut Manfaat Pembangunan Fisik Coremap, Kelurahan Pulau Abang, 2009 (%).



Sumber : Survei BME Sosial Ekonomi COREMAP, PPK-LIPI, 2009.

Kegiatan pembangunan sarana air bersih dan tong sampah yang telah dilakukan di Pulau Abang belum banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kelurahan Pulau Abang. Meskipun pembangunan tong sampah telah dilakukan di ketiga lokasi pendampingan LPSTK Pulau Abang, namun tong sampah tersebut hanya ditempatkan di satu RT pada tiap lokasinya. Masyarakat di Pulau Abang umumnya terbiasa membuang sampah di sekitar rumah mereka atau langsung membuangnya ke perairan sekitar pemukiman mereka. Oleh karena itu, masih banyak penduduk yang enggan untuk membuang sampah pada tempat yang disediakan, apalagi jika tempat sampah tersebut berjarak jauh dari rumah mereka. Sementara itu, pembangunan yang paling sedikit dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Pulau Abang adalah

pembangunan sarana air bersih. Hal ini dapat dimengerti sebab sampai saat ini pembangunan sarana air bersih baru dilakukan di lokasi Pulau Abang.

2.2.3. Permasalahan dan Kendala

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program bantuan fisik kelurahan yang digulirkan oleh Coremap II di Kelurahan Pulau Abang antara lain menyangkut masalah kesesuaian antara usulan dan realisasi kegiatan pembangunan. Jika dicermati kesesuaian antara usulan masyarakat yang termuat dalam RPTK dengan realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2005-2008 di Pulau Abang, masih banyak ditemukan ketidaksesuaian di antara keduanya. Meskipun usulan berasal dari masyarakat, namun keputusan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan akan ditentukan oleh pihak Coremap Kota Batam. Dalam kondisi seperti ini, LPSTK Kelurahan Pulau Abang hanya dapat bersikap pasif dan menunggu keputusan dari pihak Coremap. Pada akhirnya, hal tersebut membuat banyak usulan kegiatan yang diajukan masyarakat tidak dapat direalisasikan dan jangka waktu pelaksanaan kegiatan yang telah disusun dalam RPTK tidak dapat dipenuhi.

Pihak Coremap sendiri sulit untuk memenuhi semua usulan kegiatan yang diajukan oleh masyarakat karena terbentur kendala keterbatasan dana. Tidak adanya penjelasan di dokumen RPTK dari masyarakat setempat tentang skala prioritas pembangunan fisik yang mereka butuhkan membuat pihak Coremap di Kota Batam melakukan penilaian sendiri tentang jenis pembangunan fisik yang paling dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Hal inilah yang kemudian melahirkan kesalahpahaman, sebab persepsi masyarakat mengenai kebutuhan pembangunan fisik yang mereka perlukan kadangkala berbeda dengan persepsi mengenai kebutuhan masyarakat desa menurut pemerintah kota.

Pihak Coremap Batam tidak hanya menentukan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan, namun juga memutuskan lokasi pelaksanaan kegiatan. Namun kendala yang sering ditemui di Kelurahan Pulau Abang adalah belum meratanya kegiatan bantuan fisik desa ke tiap lokasi pendampingan Coremap di kelurahan ini. Meskipun pada ketiga lokasi tersebut (Pulau Abang, Air Saga dan Pulau Petong) telah dilaksanakan berbagai kegiatan pembangunan fisik desa, namun belum semuanya dilakukan secara merata dan terdistribusi dengan baik. Contohnya, pembangunan sarana air bersih yang hanya dilakukan di Pulau Abang, padahal kebutuhan terhadap sumber air bersih dirasakan di seluruh lokasi Kelurahan Pulau Abang ini.

Selain itu, fasilitas MCK yang ada di ketiga lokasi Coremap di Pulau Abang ternyata memiliki kelengkapan fasilitas yang berbeda. Di Air Saga dan Pulau Petong, fasilitas yang disediakan hanya untuk mandi dan cuci, tanpa fasilitas kakus, sementara di Pulau Abang, fasilitas tersebut dibangun dengan lengkap. Hal ini menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat sekitar sebab jika dicermati lebih jauh kakus tersebut merupakan fasilitas yang sebenarnya paling dibutuhkan oleh masyarakat Kelurahan Pulau Abang. Pengurus LPSTK sendiri tidak mengetahui alasan adanya perbedaan pembangunan fasilitas tersebut.

Program bantuan pembangunan fisik desa ini sebenarnya diharapkan dapat melibatkan peran serta dari seluruh masyarakat di lokasi pembangunan tersebut. Sayangnya, ketentuan dari pusat yang mengharuskan pelaksanaan kegiatan ini diserahkan pada pihak ketiga membuat tidak banyak masyarakat yang dapat terlibat dalam proses pelaksanaan pembangunannya. Umumnya, masyarakat hanya terlibat sebagai buruh bangunan dan bersifat temporer karena proses pembangunan ini hanya memakan waktu beberapa bulan. Selain itu, masyarakat yang dapat dipekerjakan juga terbatas, sebab proses pembangunan ini membutuhkan keahlian khusus dalam bidang konstruksi bangunan.

BAB III

PERUBAHAN PENDAPATAN MASYARAKAT

Keberhasilan proses pembangunan di suatu wilayah dapat diukur melalui indikator peningkatan kesejahteraan penduduk, antara lain variabel pendapatan masyarakat. Perubahan pendapatan dapat dicermati dengan membandingkannya antarwaktu, antarkelompok masyarakat maupun antarsumber pendapatan. Pendapatan masyarakat dapat diukur dari pendapatan rumah tangga ataupun pendapatan per kapita. Besaran penghasilan suatu rumah tangga bersumber dari seluruh pendapatan utama atau tambahan yang dihasilkan oleh kepala rumah tangga (KRT) dan anggota rumah tangga lainnya, sedangkan pendapatan per kapita dihitung dengan menjumlahkan penghasilan seluruh anggota rumah tangga dan membaginya dengan jumlah anggota rumah tangga.

Bab ini membahas perubahan pendapatan rumah tangga di Kelurahan Pulau Abang dalam kurun waktu tahun 2005-2009. Selain itu, juga dibahas perubahan pendapatan antarjenis pekerjaan yang berbeda, serta antarkelompok masyarakat yang menerima bantuan dana bergulir dari Coremap. Berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan pendapatan tersebut juga dibahas dalam bab ini.

3.1. Perubahan Pendapatan Rumah Tangga

Selama kurun waktu tahun 2005-2009, pendapatan rumah tangga responden di Kelurahan Pulau Abang mengalami fluktuasi pada setiap titik pengamatan. Pada tahun 2007 pendapatan rata-rata rumah tangga sampel di Kelurahan Pulau Abang menurun dibandingkan dengan tahun 2005. Namun pada tahun 2009 terjadi peningkatan dibanding tahun 2005 dan tahun 2007. Rata-rata pendapatan rumah tangga di Pulau Abang pada tahun 2009 sebesar Rp 1.415.500,- per bulan atau naik

sekitar 7,4 persen dibandingkan tahun 2005 dan naik 16,1 persen dari pendapatan rumah tangga pada tahun 2007 (Tabel 3.1).

Tabel 3.1

Statistik Pendapatan Rumah Tangga per Bulan, Kelurahan Pulau Abang, 2005-2009.

Pendapatan	Jumlah (Rp.)		
	2005	2007	2009
Per kapita	328.700	320.500	351.600
Rata-rata rumah tangga	1.318.100	1.219.400	1.415.500
N	100	100	108
Median	766.600	755.000	868.300
Minimum	50.000	104.100	73.300
Maksimum	7.000.000	10.833.300	16.000.000

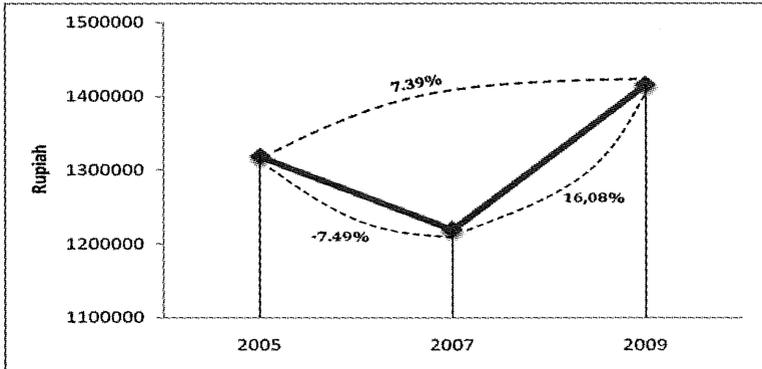
Sumber: Survei Data Dasar Aspek Sosial Ekonomi Terumbu Karang, PPK LIPI, 2005.

Survei BME Aspek Sosial Ekonomi, PPK LIPI, 2007.

Survei BME Aspek Sosial Ekonomi, PPK LIPI, 2009.

Peningkatan pendapatan rumah tangga ini juga diikuti dengan peningkatan pendapatan per kapita anggota rumah tangga responden. Jika pendapatan per kapita pada tahun 2005 sebesar Rp 328.700,- dan kemudian turun menjadi Rp 320.500,- pada tahun 2007, maka pada tahun 2009, pendapatan per kapita responden kembali naik menjadi Rp 351.600,- per bulan. Jumlah tersebut meningkat sebesar 7 persen dari tahun 2005 dan naik 9,7 persen dibanding tahun 2007. Pendapatan per kapita anggota rumah tangga responden ini lebih tinggi dibandingkan dengan garis kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2009, yaitu sebesar Rp. 283.965,-/kapita/bulan. Tren perubahan pendapatan rumah tangga di Kelurahan Pulau Abang secara detil selama kurun waktu 2005-2009 dapat dicermati pada Gambar 3.1 dan Gambar 3.2.

Gambar 3.1
Grafik Perubahan Rata-rata Pendapatan Rumah Tangga
per Bulan, Kelurahan Pulau Abang, 2005-2009.



Sumber: Survei Data Dasar Aspek Sosial Ekonomi Terumbu Karang, PPK LIPI, 2005.

Survei BME Aspek Sosial Ekonomi, PPK LIPI, 2007.

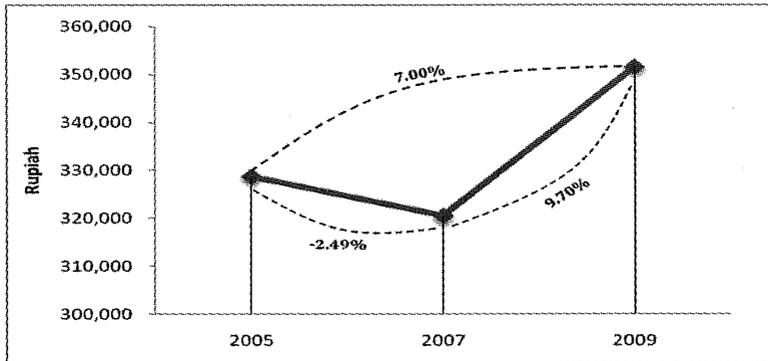
Survei BME Aspek Sosial Ekonomi, PPK LIPI, 2009.

Peningkatan pendapatan rumah tangga yang mencapai 16,1 persen dalam dua tahun terakhir dapat mengindikasikan semakin membaiknya kondisi perekonomian di wilayah Pulau Abang, terutama jika dibandingkan dengan kondisi perekonomian tahun 2005-2007. Terjadinya *multiplier effect* atau efek pengganda dari penurunan harga BBM dapat meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga.

Hal yang menarik dapat dicermati dari perubahan pendapatan rumah tangga responden di Kelurahan Pulau Abang. Persentase kenaikan pendapatan rata-rata rumah tangga selama dua titik pengamatan lebih besar dibandingkan dengan pendapatan rumah tangga per kapita. Hal ini merupakan indikasi tingginya pertumbuhan penduduk dibandingkan dengan peningkatan pendapatan.

Gambar 3.2

Grafik Perubahan Rata-rata Pendapatan Rumah Tangga per Kapita per Bulan, Kelurahan Pulau Abang, 2005-2009 (%).



Sumber: Survei Data Dasar Aspek Sosial Ekonomi Terumbu Karang, PPK LIPI, 2005.

Survei BME Aspek Sosial Ekonomi, PPK LIPI, 2007.

Survei BME Aspek Sosial Ekonomi, PPK LIPI, 2009.

Kecenderungan peningkatan pendapatan rumah tangga yang terjadi di Kelurahan Pulau Abang tidak selalu dapat memberikan gambaran riil tentang kondisi perekonomian masyarakat setempat. Jika dicermati lebih lanjut, nilai rata-rata pendapatan rumah tangga per bulan (Rp. 1.415.500,-) yang jauh lebih besar dibandingkan nilai tengah/median dari data pendapatan (Rp. 868.300,-) merupakan indikasi distribusi pendapatan yang tidak merata antarrumah tangga di wilayah ini. Pengamatan terhadap nilai median sebenarnya dapat memberikan gambaran lebih riil mengenai kondisi distribusi pendapatan di suatu wilayah, sebab nilainya tidak terpengaruh data ekstrim. Dengan nilai median pendapatan yang jauh di bawah nilai rata-rata, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden di Pulau Abang berada pada kelompok pendapatan lebih rendah. Kondisi ini semakin dipertegas dengan nilai median pendapatan per kapita di sebesar Rp. 200.000,- yang lebih rendah dari garis kemiskinan di Kota Batam sebesar Rp.

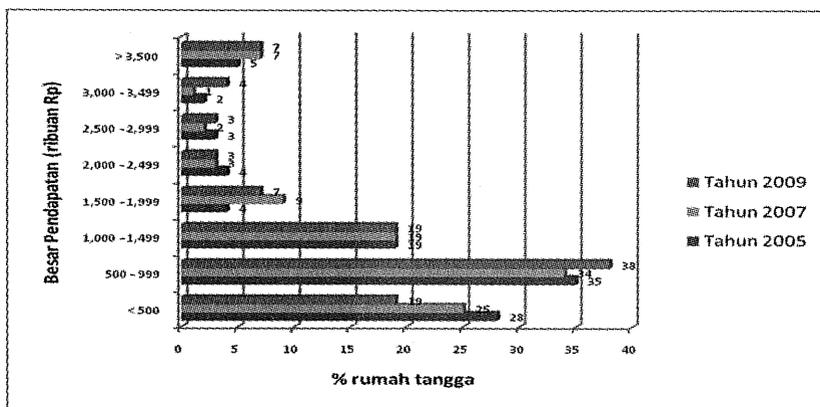
262.230,-. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara rata-rata pendapatan penduduk di Pulau Abang jauh di atas garis kemiskinan Kota Batam, namun dalam kenyataannya lebih dari 50 persen responden di Pulau Abang berada di bawah garis kemiskinan.

Dalam memahami perubahan rata-rata pendapatan di Pulau Abang selama lima tahun terakhir, perlu juga ditinjau kondisi perekonomian secara makro. Perubahan harga BBM yang cukup sering terjadi dalam kurun waktu 2005-2009 merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dalam mencermati perubahan pendapatan masyarakat. Perubahan harga BBM merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi fluktuasi harga bahan pokok. Ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan menaikkan harga BBM, hal ini sangat berpengaruh terhadap kenaikan harga bahan pokok, yang kemudian menimbulkan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK). Peningkatan IHK mengakibatkan terjadinya penurunan daya beli masyarakat meskipun terjadi peningkatan pendapatan.

Peningkatan pendapatan rumah tangga yang tidak dapat mengimbangi kenaikan harga bahan pokok memperlihatkan bahwa peningkatan pendapatan belum dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk atau peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Berdasarkan hasil survei, perubahan pendapatan rumah tangga di Pulau Abang selama tahun 2005-2009 sebesar 7,4 persen. Sebagai perbandingan, harga bahan pokok seperti beras mengalami kenaikan dua kali lipat (102,9 persen) dalam kurun waktu yang sama, yaitu dari harga Rp 2.802,-/kg pada tahun 2005 naik menjadi Rp 5.683,-/kg pada tahun 2009 (http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=3605&Itemid=29). Hal ini memberikan gambaran bahwa peningkatan pendapatan yang terjadi di Pulau Abang selama 5 tahun terakhir belum dapat mengimbangi kenaikan harga bahan pokok, sehingga belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Peningkatan pendapatan rumah tangga sampel dapat pula dilihat berdasarkan distribusi proporsi rumah tangga menurut kelompok pendapatan, misalnya penurunan proporsi yang berpendapatan rendah dan sebaliknya, peningkatan yang berpenghasilan tinggi. Pada tahun 2005, proporsi rumah tangga dalam kelompok pendapatan < Rp. 500.000,- sebesar 28 persen. Proporsi ini berkurang menjadi 25 persen pada tahun 2007 dan pada tahun 2009 menurun lagi mencapai 18 persen. Sementara itu, proporsi rumah tangga dalam kelompok pendapatan lain umumnya mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir (Gambar 3.3). Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi ekonomi melalui peningkatan pendapatan rumah tangga, terutama pada kelompok masyarakat berpendapatan terendah. Namun sayangnya, perbaikan kondisi ekonomi tidak berujung pada perbaikan kesejahteraan karena meningkatnya harga barang-barang kebutuhan pokok.

Gambar 3.3
Distribusi Rumah Tangga Menurut Kelompok Pendapatan per Bulan, Kelurahan Pulau Abang, 2005-2009 (%).



Sumber: Survei Data Dasar Aspek Sosial Ekonomi Terumbu Karang, PPK LIPI, 2005.
Survei BME Aspek Sosial Ekonomi, PPK LIPI, 2007.
Survei BME Aspek Sosial Ekonomi, PPK LIPI, 2009.

Di antara semua kelompok pendapatan, proporsi terbesar rumah tangga responden di Kelurahan Pulau Abang berada pada kelompok pendapatan Rp. 500.000,- - Rp. 999.999,- per bulan. Lebih dari sepertiga responden (38 persen) berada pada kelompok pendapatan tersebut dan proporsinya meningkat dalam 5 tahun terakhir. Dari Gambar 3.3, fenomena yang dapat dicermati adalah lebih dari 80 persen responden menempati 4 kelompok pendapatan terendah. Hal ini menunjukkan besarnya ketimpangan pendapatan di antara rumah tangga terpilih dalam penelitian ini.

Ketimpangan pendapatan dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, antara lain perbedaan lapangan pekerjaan yang dilakukan oleh anggota rumah tangga. Selain itu, banyaknya pekerjaan yang dilakukan oleh kepala rumah tangga juga berpengaruh terhadap perbedaan pendapatan rumah tangga. Hasil survei menunjukkan sekitar 14,8 persen kepala rumah tangga sampel memiliki pekerjaan tambahan yang memungkinkan rumah tangga untuk mendapatkan pendapatan lebih besar. Gambaran lebih lengkap mengenai distribusi pendapatan rumah tangga berdasarkan lapangan pekerjaan utama kepala rumah tangga dapat dicermati pada Tabel 3.2.

Lapangan pekerjaan yang memiliki rata-rata pendapatan terbesar di Kelurahan Pulau Abang adalah bidang perdagangan, kemudian diikuti bidang jasa dan bidang lainnya, yang mencakup angkutan dan bangunan. Kepala rumah tangga yang bekerja di bidang perdagangan mencakup para pengumpul ikan dari nelayan yang kemudian menjualnya ke pasar domestik dan internasional. Meskipun rata-rata pendapatan di bidang perdagangan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2007, namun masih jauh lebih besar dibandingkan pendapatan pada tahun 2005. Ada kemungkinan tingginya pendapatan yang diperoleh dari sektor perdagangan menjadi daya tarik bagi sebagian kepala rumah tangga untuk bekerja di sektor ini. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya kepala rumah tangga yang bekerja di sektor perdagangan, yaitu dari 3 orang pada tahun 2005 menjadi 4 orang dan 7 orang pada tahun 2007 dan 2009 secara berurutan.

Tabel 3.2

Pendapatan Rata-rata Rumah Tangga per Bulan Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Kepala Rumah Tangga, Kelurahan Pulau Abang, 2005-2009.

Lapangan Pekerjaan	Pendapatan Rata-rata (Rp.)					
	2005	N	2007	N	2009	N
Perikanan laut	1.427.800	78	1.055.500	79	1.228.300	91
Perikanan budidaya	1.348.300	1	-	-	-	-
Pertanian tanaman keras	50.000	1	1.260.200	3	-	-
Perdagangan (ikan, warung)	984.800	3	4.160.400	4	3.825.100	7
Jasa	1.268.100	8	1.591.600	4	2.117.300	5
Industri pengolahan	1.025.000	2	600.000	3	989.300	3
Lainnya (angkutan, bangunan)	475.000	2	1.916.600	2	1.415.500	2

Sumber: Survei Data Dasar Aspek Sosial Ekonomi Terumbu Karang, PPK LPI, 2005.

Survei BME Aspek Sosial Ekonomi, PPK LPI, 2007.

Survei BME Aspek Sosial Ekonomi, PPK LPI, 2009.

Jumlah kepala rumah tangga yang memiliki pekerjaan utama di bidang kenelayanan mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir, yaitu dari 79 persen pada tahun 2005 dan 2007 menjadi 84,2 persen pada tahun 2009. Namun sebaliknya, rata-rata pendapatan di bidang kenelayanan ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2005. Berdasarkan kenyataan ini dapat dikatakan bahwa bertambah banyaknya penduduk yang melakukan eksploitasi sumber daya laut berbanding terbalik dengan penghasilan yang diperoleh.

Tidak adanya responden yang memiliki lapangan pekerjaan utama di bidang perikanan budidaya ataupun pertanian tanaman keras bukan menandakan bahwa aktifitas usaha ini tidak dilakukan di Kelurahan Pulau Abang. Kepala rumah tangga umumnya menjadikan aktifitas perikanan budidaya dan pertanian tanaman keras sebagai pekerjaan tambahan. Hal ini karena kegiatan perikanan budidaya memerlukan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan hasil, sehingga masyarakat belum bisa menggantungkan pendapatan mereka pada bidang pekerjaan ini. Sementara itu, kegiatan pertanian tanaman keras umumnya dilakukan masyarakat hanya untuk keperluan pangan mereka sehari-hari dan tidak dijadikan sebagai sumber pendapatan rumah tangga.

3.2. PERUBAHAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA NELAYAN

Kegiatan kenelayanan merupakan lapangan pekerjaan yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Pulau Abang, baik sebagai pekerjaan utama ataupun sebagai pekerjaan tambahan. Hasil survei menunjukkan pada tahun 2009 terdapat 86,1 persen rumah tangga yang melakukan kegiatan kenelayanan, baik oleh kepala rumah tangga maupun oleh anggota rumah tangga lainnya. Meskipun demikian, proporsi ini menunjukkan penurunan dibandingkan kondisi tahun 2005 dan 2007. Sebelumnya, seluruh rumah tangga responden di Pulau Abang memiliki anggota rumah tangga yang bekerja di bidang kenelayanan. Hal ini menunjukkan adanya tren perubahan lapangan kerja utama penduduk yang tidak lagi sepenuhnya bergantung pada sumberdaya laut.

Banyaknya penduduk yang bergantung pada kegiatan kenelayan disebabkan banyak jenis ikan yang terdapat di perairan sekitar Pulau Abang memiliki nilai ekonomis tinggi dan juga merupakan komoditas ekspor. Hasil tangkapan nelayan umumnya didominasi cumi dan ikan dingkis, kemudian diikuti ikan ekor kuning, kerapu, kerapu sunu, dan ikan karang lainnya. Pada beberapa tahun terakhir, ikan tangkapan nelayan Pulau Abang yang termahal adalah udang kara (Rp. 130.000,- per kg), ikan kerapu sunu (Rp. 50.000,- – Rp. 100.000,- per kg) dan ikan dingkis pada hari raya Imlek (Rp. 100.000,-/kg) (LPSTK Kelurahan Pulau Abang, 2007).

Nelayan di Pulau Abang tidak menjual langsung hasil tangkapannya ke pasar, namun mereka memilih untuk menjualnya kepada pengusaha lokal, yang kemudian menjual lagi ke pengumpul yang lebih besar atau langsung mengekspornya, antara lain ke Singapura. Fluktuasi harga ikan yang menjadi komoditas ekspor ini sangat bergantung pada kurs rupiah terhadap mata uang asing dan juga permintaan serta stok di pasar. Hal inilah yang kemudian berperan besar dalam menyebabkan terjadinya perubahan pendapatan para nelayan. Data pada Tabel 3.3 menyajikan statistik pendapatan rumah tangga responden dari kegiatan kenelayan selama periode tahun 2005-2009.

Tabel 3.3

Statistik Pendapatan Rumah Tangga per bulan dari Kegiatan Kenelayanan, Kelurahan Pulau Abang, 2005-2009.

Pendapatan	2005	2007	2009
Per kapita	245.900	242.400	259.500
Rata-rata rumah tangga	995.600	894.900	1.064.400
N	100	100	93
Median	716.600	612.500	800.000
Minimum	150.000	50.000	73.300
Maksimum	7.000.000	5.575.00 0	10.970.70 0

Sumber: Survei Data Dasar Aspek Sosial Ekonomi Terumbu Karang, PPK LIPI, 2005.

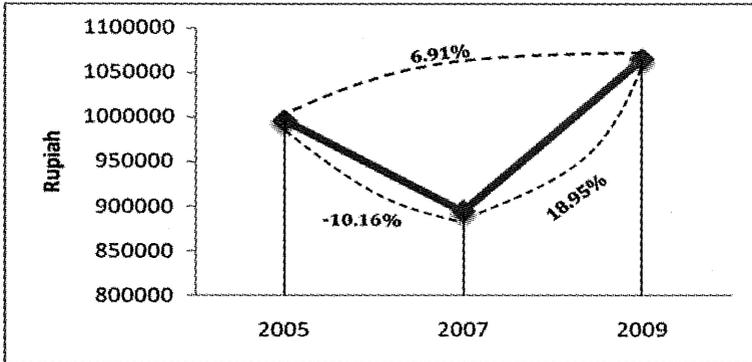
Survei BME Aspek Sosial Ekonomi, PPK LIPI, 2007.

Survei BME Aspek Sosial Ekonomi, PPK LIPI, 2009.

Sama halnya dengan pendapatan rumah tangga pada umumnya, pendapatan dari kegiatan kenelayanan juga mengalami fluktuasi selama periode 2005-2009. Gambar 3.4 memperlihatkan selama kurun waktu 2005-2007 rata-rata pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan menurun sebesar - 10,2 persen. Penurunan ini lebih besar daripada penurunan rata-rata pendapatan secara umum, yaitu - 7,5 persen. Sebaliknya rata-rata pendapatan rumah tangga nelayan meningkat sebesar 18,9 persen pada periode 2007-2009, juga lebih tinggi daripada rata-rata pendapatan rumah tangga pada umumnya (16,1 persen). Jika dihitung selama kurun waktu 4 tahun (2005-2009), pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan mengalami peningkatan sebesar 6,9 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan peningkatan rata-rata pendapatan secara keseluruhan (7,4 persen).

Gambar 3.4

Grafik Perubahan Rata-rata Pendapatan Rumah Tangga per Bulan dari Kegiatan Kenelayanan, Kelurahan Pulau Abang, Tahun 2005-2009 (%).

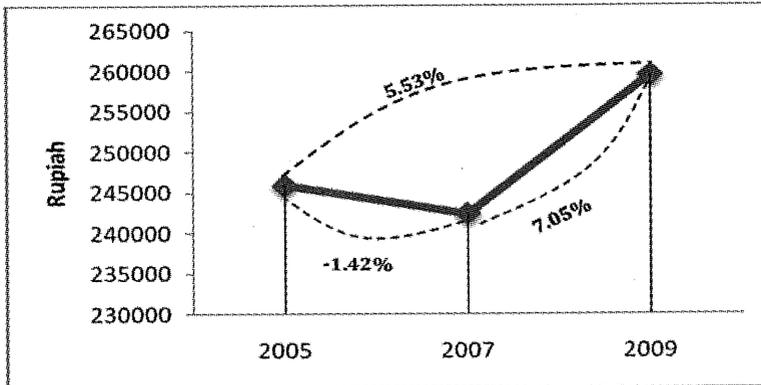


Sumber: Survei Data Dasar Aspek Sosial Ekonomi Terumbu Karang, PPK LIPI, 2005.
Survei BME Aspek Sosial Ekonomi, PPK LIPI, 2007.
Survei BME Aspek Sosial Ekonomi, PPK LIPI, 2009.

Rata-rata pendapatan per kapita rumah tangga juga berfluktuasi, namun tidak setajam pendapatan secara keseluruhan. Hal ini terlihat dari Gambar 3.5, yaitu penurunan sebesar - 1,42 persen pada tahun 2005-2007 dan peningkatan sebesar 7,1 persen selama dua tahun berikutnya (2007-2009). Meskipun mengalami peningkatan, rata-rata pendapatan per kapita rumah tangga di bidang kenelayanan tetap lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata pendapatan per kapita secara keseluruhan. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa secara umum penduduk yang bekerja di bidang kenelayanan memiliki pendapatan yang relatif rendah dibandingkan penduduk yang bekerja di bidang non kenelayanan.

Gambar 3.5

Grafik Perubahan Rata-rata Pendapatan Rumah Tangga per Kapita per Bulan dari Kegiatan Kenelayanan, Kelurahan Pulau Abang, Tahun 2005-2009 (%).



Sumber: Survei Data Dasar Aspek Sosial Ekonomi Terumbu Karang, PPK LIPI, 2005.

Survei BME Aspek Sosial Ekonomi, PPK LIPI, 2007.

Survei BME Aspek Sosial Ekonomi, PPK LIPI, 2009

Perubahan musim gelombang dan angin perlu dicermati dalam memahami kecenderungan perubahan pendapatan nelayan setiap tahun, sebab kondisi alam sangat mempengaruhi besar pendapatan yang diterima dalam kegiatan kenelayanan. Pada musim gelombang kuat, nelayan pada umumnya tidak dapat mencari ikan sampai ke tengah laut dan memilih untuk menangkap ikan di sekitar selat dan laut yang terlindung. Pada musim ini, nelayan menangkap ikan dengan menggunakan kelong pantai dan jaring dingkis atau memanfaatkan rumpon sebagai lokasi untuk memancing. Pada gelombang pancaroba, angin tidak sekuat saat gelombang kuat, namun nelayan tetap agak sulit untuk memperoleh pendapatan dari penangkapan ikan. Kegiatan kenelayanan yang sering dilakukan nelayan di Pulau Abang adalah memancing ikan di malam hari. Selain itu, nelayan juga

memancing di sekitar karang, memasang bubu, menyomok pada malam hari atau memancing ikan delah pada siang hari. Hal berbeda terjadi pada gelombang tenang, ketika hasil tangkapan melimpah. Selain nelayan dapat menggunakan pancing untuk menangkap ikan karang dan bubu, mereka juga bisa menangkap sotong dengan cara menyomok atau menyandit pada malam hari (LPSTK Kelurahan Pulau Abang, 2007), sehingga memungkinkan para nelayan memperoleh penghasilan yang cukup besar pada musim tenang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nelayan umumnya mendapatkan penghasilan tertinggi pada musim gelombang tenang dan tren ini terjadi sepanjang tahun 2005-2009 (Tabel 3.4). Namun demikian, pendapatan nelayan di musim tenang pada tahun 2009 lebih rendah dibandingkan pendapatan gelombang tenang pada tahun 2005. Hal ini kemungkinan merupakan salah satu indikasi terjadinya penurunan komoditas perikanan yang ditangkap nelayan. Meskipun rata-rata pendapatan nelayan pada musim gelombang tenang menurun dalam kurun waktu tahun 2005-2009, namun median pendapatan musim tersebut mengalami peningkatan 23,1 persen. Hal ini menunjukkan semakin berkurangnya ketimpangan pendapatan nelayan saat gelombang tenang.

Pada musim pancaroba dan gelombang kuat, tidak semua nelayan turun menangkap ikan ke laut. Keterbatasan armada dan alat tangkap membuat beberapa nelayan mengalami hambatan dalam melaksanakan aktifitas kenelayanan. Hal ini menyebabkan nelayan tersebut tidak mendapatkan penghasilan sama sekali dalam bidang perikanan tangkap saat musim gelombang kuat dan pancaroba. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, mereka melakukan pekerjaan sampingan, misalnya di bidang budidaya perikanan atau industri pengolahan.

Dari tahun ke tahun, eksploitasi sumberdaya perikanan berpengaruh terhadap menurunnya pendapatan di bidang kenelayanan. Meskipun menurut survei rata-rata pendapatan kenelayanan di Pulau Abang dalam kurun waktu tahun 2005-2009 cenderung meningkat, namun para nelayan sendiri tidak merasakan adanya peningkatan dalam hal jumlah hasil tangkap ataupun pendapatan melaut (Gambar 3.6). Semakin

banyaknya penduduk yang bekerja menjadi nelayan, yang kemudian diikuti dengan semakin bervariasinya jenis dan jumlah alat tangkap yang digunakan nelayan, pada akhirnya berdampak terhadap eksploitasi sumberdaya perikanan yang mengabaikan aspek pelestarian lingkungan perairan setempat.

Tabel 3.4

Statistik Pendapatan Rumah Tangga per Bulan dari Kegiatan Kenyelayanan Menurut Musim, Kelurahan Pulau Abang, 2005-2009.

Pendapatan	Musim			Musim			Musim		
	Gelombang kuat			Pancaroba			Gelombang tenang		
	2005	2007	2009	2005	2007	2009	2005	2007	2009
Rata-rata	719.900	770.100	744.000	972.000	917.700	891.900	1.595.300	1.250.100	1.557.300
Median	406.000	370.000	500.000	690.000	600.000	480.000	975.000	900.000	1.200.000
Mininum	36.000	45.000	0	100.000	75.000	0	10.000	75.000	200.000
Maksimum	7.000.000	10.500.000	6.400.000	7.000.000	4.200.000	25.000.000	8.000.000	6.000.000	6.000.000
N	100	100	93	100	100	93	100	100	93

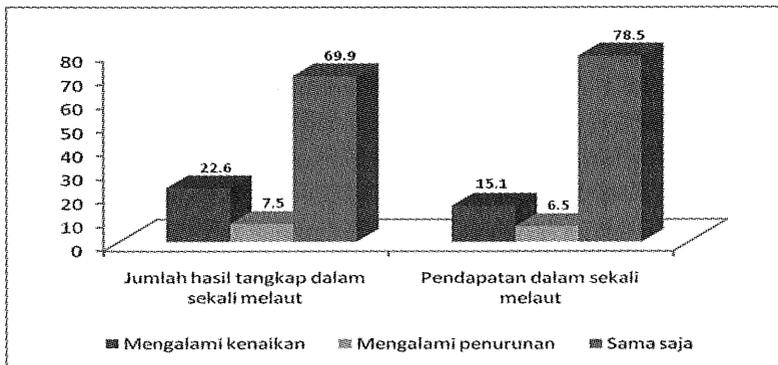
Sumber: Survei Data Dasar Aspek Sosial Ekonomi Terumbu Karang, PPK LPI, 2005.

Survei BME Aspek Sosial Ekonomi, PPK LPI, 2007.

Survei BME Aspek Sosial Ekonomi, PPK LPI, 2009.

Pendapat responden ini sejalan dengan hasil laporan Monitoring Terumbu Karang Coremap II Kota Batam tahun 2008 yang menunjukkan adanya penurunan individu ikan karang yang menjadi target tangkapan nelayan setempat dalam kurun waktu tahun 2004-2008 pada beberapa titik transek di Pulau Abang. Hal tersebut dapat memberikan gambaran bahwa masyarakat di Pulau Abang tidak bisa bergantung lagi sepenuhnya pada bidang usaha perikanan tangkap, sebab komoditas perikanan di perairan sekitar wilayah ini cenderung menurun tiap tahunnya. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan memiliki sumber penghasilan lain di luar bidang perikanan tangkap agar dapat menjaga keberlanjutan sumber penghasilan mereka.

Gambar 3.6
Persepsi Responden Mengenai Jumlah Hasil Tangkapan dan Pendapatan Melaut, Kelurahan Pulau Abang, 2005-2009 (%).



Sumber : Survei BME Aspek Sosial Ekonomi, PPK LIPI, 2009.

3.3. PENDAPATAN RUMAH TANGGA ANGGOTA POKMAS

Terbentuknya kelompok masyarakat (pokmas) sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan MPA di Kelurahan Pulau Abang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga anggotanya. Data pada Tabel

3.5 menunjukkan rata-rata pendapatan rumah tangga anggota pokmas per bulan (Rp. 1.708.500,-) lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pendapatan rumah tangga yang bukan anggota pokmas (Rp. 1.297.500,-). Kondisi ekonomi yang lebih baik juga ditunjukkan dalam perbandingan pendapatan per kapita rumah tangga per bulan antara anggota pokmas dan non anggota pokmas. Rata-rata pendapatan per kapita anggota pokmas sebesar Rp. 429.150,-, jauh lebih besar dibanding pendapatan per kapita non anggota pokmas (Rp. 320.150,-) dan juga pendapatan per kapita rumah tangga per bulan secara keseluruhan (Rp. 351.600,-). Pendapatan rumah tangga anggota pokmas yang lebih baik daripada rumah tangga non anggota pokmas dapat dipahami sebab umumnya anggota pokmas memiliki lebih dari satu pekerjaan. Selain berusaha dalam pokmas, mereka juga melakukan pekerjaan yang telah dilakukan sebelum mereka bergabung dalam pokmas. Sumber penghasilan yang lebih banyak tentunya dapat berimbans pada jumlah penghasilan yang jauh lebih besar.

Distribusi pendapatan rumah tangga anggota pokmas dan non anggota pokmas menunjukkan pola yang serupa (Gambar 3.6). Mayoritas responden berada pada tiga kelompok pendapatan terendah, yaitu kurang dari Rp. 1.500.000,-. Meskipun demikian, pendapatan rumah tangga anggota pokmas jauh lebih baik dibandingkan dengan rumah tangga non anggota pokmas. Hal ini terlihat dari proporsi anggota pokmas yang lebih besar pada kelompok pendapatan lebih dari Rp. 1.500.000,-.

Peningkatan pendapatan rumah tangga anggota pokmas ini belum dapat mengurangi ketimpangan pendapatan yang terjadi pada responden di Pulau Abang. Secara sederhana, pemerataan pendapatan rumah tangga dapat dilihat dari perbandingan antara nilai median dan rata-rata pendapatannya. Perbandingan yang semakin mendekati nilai 1 dapat diartikan semakin meratanya pendapatan rumah tangga. Hasil penelitian ini memperlihatkan perbandingan antara nilai median dan rata-rata pendapatan rumah tangga anggota pokmas sebesar 0,54. Nilai ini lebih rendah dibanding perbandingan median dan rata-rata pendapatan

anggota non pokmas (0,63). Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan antaranggota pokmas lebih besar dibandingkan ketimpangan pendapatan non anggota pokmas.

Tabel 3.5

Statistik Pendapatan Rumah Tangga Anggota Pokmas dan Non Anggota Pokmas per Bulan, Kelurahan Pulau Abang Tahun, 2009.

Pendapatan	Anggota Pokmas	Non Anggota Pokmas	Anggota + Non Anggota Pokmas
Per kapita	429.150	320.150	351.600
Rata-rata rumah tangga	1.708.500	1.297.500	1.415.500
N	31	77	108
Median	926.700	820.000	868.300
Minimum	200.000	73.300	73.300
Maksimum	10.970.700	16.000.000	16.000.000

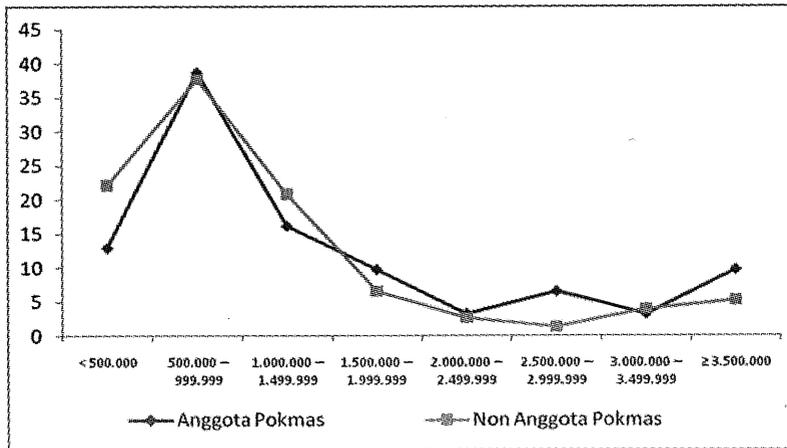
Sumber: Survei Data Dasar Aspek Sosial Ekonomi Terumbu Karang, PPK-LIPI, 2005.

Kegiatan MPA yang bertujuan untuk membantu peningkatan pendapatan masyarakat, pada kenyataannya belum dapat memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi kesejahteraan penduduk Pulau Abang. Meskipun adanya tren peningkatan pendapatan yang dialami oleh anggota pokmas di wilayah ini, namun peningkatan pendapatan yang terjadi hanya dialami oleh sebagian kecil masyarakat, yaitu penduduk yang menjadi anggota pokmas dan peneriman pinjaman individu dari LSPTK. Kegiatan MPA yang baru berjalan 2-3 tahun di wilayah ini belum dapat diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kondisi perekonomian penduduk, sebab jenis kegiatan yang

ditawarkan merupakan suatu hal yang baru bagi masyarakat setempat, sehingga masyarakat umumnya masih dalam tahap uji coba dalam melaksanakan kegiatan ini.

Gambar 3.7

Grafik Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Anggota Pokmas dan Non Anggota Pokmas per Bulan, Kelurahan Pulau Abang, 2009.



Sumber: Survei BME Aspek Sosial Ekonomi, PPK LIPI, 2009.

Selain itu, belum semua pokmas yang aktif di Pulau Abang telah berhasil mendapatkan keuntungan produksi. Sistem bagi hasil pada akhir periode produksi yang diterapkan oleh pokmas membuat keuntungan hasil usaha umumnya hanya diterima sekali dalam setahun. Hal ini berakibat kebanyakan anggota pokmas cenderung menganggap bagi hasil kegiatan pokmas tersebut hanya sekedar bonus dan belum dapat diandalkan sebagai tambahan pendapatan rumah tangga. Meskipun demikian, keberhasilan usaha beberapa pokmas di Pulau Abang diharapkan dan menjadi langkah awal pengembangan usaha alternatif di wilayah ini selain kegiatan kenelayanan. Masyarakat umumnya membutuhkan

adanya *success story* terlebih dahulu untuk bisa diyakinkan agar bersedia turut serta dalam kegiatan pokmas MPA binaan Coremap II.

Keberadaan jenis bantuan lain seperti pinjaman individu yang digulirkan oleh LPSTK Pulau Abang juga berpotensi besar dalam usaha peningkatan pendapatan masyarakat. Meskipun saat ini baru sedikit penduduk yang mendapatkan guliran dana tersebut dan baru beberapa bulan dana ini digulirkan, namun program ini memiliki dampak yang cukup baik terhadap kondisi sosial ekonomi penduduk. Hal ini terutama berkaitan dengan keberadaan bank pasar, yang memberikan pinjaman dengan bunga tinggi dan sistem pengembalian pinjaman yang sangat merugikan masyarakat di Pulau Abang. Pinjaman individu yang ditawarkan oleh pengelola LPSTK Pulau Abang sejak tahun 2009 dianggap merupakan pilihan alternatif keuangan yang lebih menguntungkan bagi masyarakat ketika mereka membutuhkan modal usaha, dibandingkan harus meminjam kepada bank pasar.

Kegiatan Coremap lainnya di Pulau Abang yaitu program bantuan fisik desa belum dirasakan pengaruhnya terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Tambahan pendapatan hanya dirasakan sebagian kecil masyarakat, yaitu ketika mereka berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan bantuan fisik desa seperti pembuatan tempat sampah, sarana MCK (mandi, cuci, kakus), dan dermaga kapal. Partisipasi mereka hanya terbatas sebagai buruh bangunan ataupun pemilik perahu yang digunakan untuk mengangkut bahan bangunan dan mereka memperoleh upah atas pekerjaan yang dilakukan. Tidak semua masyarakat dapat merasakan manfaat tambahan pendapatan dari kegiatan pembangunan fisik desa ini, sebab tidak banyak penduduk Pulau Abang (yang mayoritas nelayan) yang memiliki keahlian di bidang konstruksi. Selain itu, proses pembangunan fisik yang tidak terlalu memakan waktu lama membuat masyarakat tidak terlalu merasakan tambahan pendapatan yang berarti.

3.4. CAPAIAN EKONOMI COREMAP

Kegiatan rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang yang dilaksanakan oleh Coremap mempunyai berbagai tujuan yang hendak dicapai, baik dari aspek ekologi maupun ekonomi. Mengacu pada "Project Appraisal Document" tahun 2005 yang merupakan kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan ADB sebagai pihak yang berkerjasama dalam bidang pendanaan proyek, terdapat 2 target di bidang ekonomi. Keduanya adalah peningkatan pendapatan masyarakat di lokasi Coremap sebesar 2 persen per tahun dan peningkatan taraf hidup sekitar 10.000 rumah tangga pada akhir program, sebagaimana telah dikemukakan pada Bab I. Semua target tersebut bermuara pada terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di lokasi Coremap.

Capaian peningkatan pendapatan masyarakat dapat dikaji dengan membandingkan pendapatan saat kegiatan Coremap belum dilaksanakan dengan setelah kegiatan-kegiatan program tersebut terlaksana. Berdasarkan pendapatan pada dua periode waktu yang berbeda dapat diketahui apakah terjadi peningkatan atau sebaliknya, penurunan pendapatan masyarakat. Meskipun demikian, sulit mengatakan bahwa perubahan yang terjadi merupakan dampak dari kegiatan Coremap karena banyak faktor lain yang ikut mempengaruhinya.

Dari data pada Tabel 3.1 terlihat bahwa pendapatan rata-rata rumah tangga responden mengalami peningkatan selama periode 2005-2009, meskipun terjadi fluktuasi di antara masa empat tahun tersebut. Selama periode waktu tersebut terjadi pertumbuhan rata-rata pendapatan rumah tangga sebesar 1,8 persen per tahun. Sejalan dengan itu, rata-rata pendapatan rumah tangga per kapita juga mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan yang sedikit lebih rendah, yaitu 1,7 persen per tahun dalam kurun waktu 2005-2009. Peningkatan tersebut jauh di bawah tingkat inflasi Kota Batam yang mencapai 7 persen per tahun (BPS, 2009). Oleh karena itu, peningkatan pendapatan belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Seperti rata-rata pendapatan rumah tangga secara keseluruhan, dalam kurun waktu 2005-2009 juga terjadi peningkatan rata-rata pendapatan

rumah tangga dari kegiatan kenelayanan (lihat Tabel 3.3). Laju pertumbuhannya sebesar 1.7 persen per tahun. Selanjutnya, rata-rata pendapatan rumah tangga per kapita dari kegiatan kenelayanan juga mengalami peningkatan dalam periode waktu yang sama, namun dengan laju pertumbuhan yang lebih rendah, yaitu 1,3 persen per tahun.

Berdasarkan kenyataan di atas, dapat dikatakan bahwa capaian Coremap dari aspek ekonomi masih di bawah target yang telah ditetapkan dalam rancangan program. Namun demikian, perbedaan antara capaian dan rencana relatif kecil, yaitu sebesar 0,2 persen per tahun untuk rata-rata pendapatan secara keseluruhan. Jika target peningkatan pendapatan diukur dengan rata-rata pendapatan dari kegiatan kenelayanan, maka perbedaan antara capaian dan targei adalah 0,3 persen per tahun.

BAB IV

PENUTUP

Program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang (Coremap) diluncurkan untuk menyelamatkan terumbu karang yang sebagian di antaranya berada dalam kondisi memprihatinkan. Kegiatan Coremap tidak hanya mencakup pengelolaan terumbu karang dalam arti sempit, melainkan juga sumber daya alam yang terkait dengannya seperti mangrove dan padang lamun (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2005). Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya Coremap juga memberi perhatian pada upaya pengelolaan sumber daya alam di wilayah pesisir, di samping juga sumber daya laut secara umum.

Penyelamatan dan pengelolaan terumbu karang penting dilakukan mengingat sumber daya ini merupakan sumber mata pencaharian utama penduduk yang tinggal di wilayah pesisir dan juga memberikan pendapatan bagi negara. Agar keselamatan terumbu karang dapat terjaga, perlu dilakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menghindarkan manusia di sekitarnya dari eksploitasi sumber daya laut secara berlebihan. Untuk itu, Coremap melaksanakan dan mengembangkan kegiatan mata pencaharian alternatif, terutama yang dapat mengurangi atau bahkan menghentikan eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya laut pada umumnya dan terumbu karang secara khusus.

Masing-masing kegiatan yang dilaksanakan Coremap mempunyai target, sesuai dengan aspek yang menjadi fokusnya. Oleh karena itu, keberhasilan Coremap diukur berdasarkan capaian semua kegiatan, baik dari aspek fisik, sosial maupun ekonomi. Bagian ini membahas dampak kegiatan Coremap terhadap kehidupan masyarakat di lokasi Coremap di Kelurahan Pulau Abang. Dampak yang dikaji adalah dari aspek ekonomi dan non ekonomi. Dari aspek non ekonomi, pembahasan difokuskan pada aspek sosial, termasuk perubahan perilaku masyarakat dalam

pengelolaan sumber daya laut serta dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat akibat penyelenggaraan kegiatan Coremap.

4.1. DAMPAK EKONOMI PELAKSANAAN COREMAP

Pada Bab II telah dibahas dampak kegiatan Coremap terhadap kondisi ekonomi masyarakat di Kelurahan Pulau Abang, khususnya perubahan pendapatan. Perubahan pendapatan masyarakat diamati secara periodik setiap dua tahun sekali, mulai dari tahun 2005, saat kegiatan Coremap belum dilaksanakan, tahun 2007, dan tahun 2009. Dengan demikian, dapat diketahui dampak kegiatan Coremap setelah dua tahun dan empat tahun kegiatan berjalan.

Dibandingkan dengan tahun 2005 rata-rata pendapatan masyarakat (dalam penelitian ini ditunjukkan oleh rumah tangga yang terpilih sebagai sampel) di Kelurahan Pulau Abang per bulan pada tahun 2009 lebih tinggi sekitar 7,4 persen. Fenomena ini tidak hanya ditemukan pada pendapatan rata-rata rumah tangga, akan tetapi juga pada pendapatan per kapita dan median pendapatan masyarakat. Pendapatan per kapita naik sebesar 7 persen selama periode waktu 2005-2007, sementara median pendapatan meningkat sebesar 13,3 persen selama periode yang sama.

Meskipun pendapatan masyarakat pada tahun 2009 mengalami peningkatan dibanding tahun 2005, sesungguhnya terjadi fluktuasi pendapatan dalam kurun waktu empat tahun tersebut. Pada tahun 2005-2007 pendapatan masyarakat mengalami penurunan sebesar 7,5 persen, namun sepanjang tahun 2007-2009 terjadi peningkatan dengan persentase yang jauh lebih besar yaitu 16,1 persen. Penurunan pendapatan terutama terjadi karena meningkatnya biaya produksi, antara lain akibat kenaikan harga BBM. Kebijakan pemerintah untuk menurunkan harga BBM, seperti yang terjadi pada akhir tahun 2008 dan awal tahun 2009 berdampak positif terhadap pendapatan masyarakat.

Peningkatan tidak hanya terjadi pada pendapatan rumah tangga secara umum, akan tetapi juga pendapatan dari kegiatan kenelayanan. Pada tahun 2009 pendapatan rumah tangga per bulan dari kegiatan kenelayanan meningkat sebesar 6,9 persen dibanding tahun 2005. Selanjutnya, pendapatan per kapita dari kegiatan yang sama mengalami peningkatan sebesar 5,5 persen. Seperti pendapatan pada umumnya, pendapatan dari kegiatan kenelayanan juga mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2005-2009 dengan pola yang sama.

Berdasarkan data pendapatan selama empat tahun pelaksanaan Coremap dapat diketahui telah terjadi peningkatan kondisi ekonomi masyarakat. Namun demikian, sulit untuk mengetahui secara pasti faktor-faktor tertentu yang memberi sumbangan terhadap meningkatnya pendapatan masyarakat. Dalam penelitian ini tidak dilakukan kontrol terhadap pendapatan, dalam arti membedakannya berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi perolehan penghasilan, misalnya hanya menganalisa pendapatan dari aktifitas ekonomi yang terkait dengan kegiatan Coremap. Pemisahan pendapatan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi perolehannya hampir tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa peningkatan pendapatan masyarakat terjadi karena kontribusi banyak faktor, termasuk juga Coremap.

Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan Coremap, capaian peningkatan pendapatan masyarakat di Kelurahan Pulau Abang masih lebih rendah. *Asian Development Bank* (ADB) yang merupakan salah satu institusi pembiayaan kegiatan Coremap menetapkan target peningkatan pendapatan masyarakat di lokasi Coremap sebesar 2 persen per tahun. Kenyataannya, pendapatan masyarakat meningkat dengan laju pertumbuhan yang lebih rendah, yaitu 1,8 persen per tahun. Khusus untuk dari kegiatan kenelayanan, pertumbuhan pendapatan per tahun lebih rendah, yaitu 1,7 persen. Selanjutnya, laju pertumbuhan pendapatan per kapita sebesar 1,7 persen setiap tahun dan pendapatan per kapita dari kegiatan kenelayanan bahkan lebih rendah, yaitu 1,3 persen per tahun.

Dalam konteks kesejahteraan masyarakat di lokasi Coremap, dapat dikatakan bahwa peningkatan pendapatan tidak selalu sejalan dengan peningkatan kesejahteraan. Hal ini karena peningkatan pendapatan tidak sebanding dengan kenaikan harga barang-barang kebutuhan sehari-hari, termasuk kebutuhan pokok. Di satu pihak terjadi peningkatan pendapatan sebesar 1,7 persen per tahun, namun di sisi lain laju inflasi di Kota Batam adalah 7 persen per tahun. Dengan kondisi tersebut daya beli masyarakat sulit ditingkatkan yang pada gilirannya menjadi hambatan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Bertolak dari kenyataan di atas, untuk masa selanjutnya, khususnya pada pelaksanaan Coremap fase ketiga perlu dilakukan upaya yang lebih maksimal agar target program dapat tercapai. Upaya tersebut antara lain lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi Coremap, sehingga lebih banyak yang memperoleh manfaat dari kegiatan program tersebut. Untuk mendorong partisipasi masyarakat, pemberian pengetahuan mengenai Coremap dan segala kegiatan yang dilaksanakannya perlu lebih diintensifkan. Dengan kata lain, sosialisasi kegiatan Coremap masih harus dilakukan dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

4.2. PERUBAHAN PRILAKU MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA LAUT (SDL)

Pengelolaan terumbu karang juga melibatkan pengelolaan (aktifitas) manusia yang tinggal di sekitarnya, terutama yang menggantungkan hidup pada sumber daya laut. Fakta menunjukkan bahwa penyebab utama kerusakan terumbu karang dan sumber daya laut pada umumnya adalah aktifitas manusia yang terkait dengan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam tersebut. Oleh karenanya, perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sumber daya laut menjadi salah satu sasaran dari kegiatan Coremap. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran penduduk di wilayah pesisir

tentang pentingnya sumber daya laut, sehingga menjadi dasar bagi mereka untuk memelihara kelestariannya.

Setelah dilaksanakan selama empat tahun, dampak positif Coremap yang terlihat nyata adalah perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan terumbu karang dan sumber daya laut pada umumnya. Aktifitas-aktifitas kenelayan yang berpotensi menimbulkan kerusakan terumbu karang yang sebelumnya biasa dilakukan masyarakat seperti menggunakan alat tangkap dan bahan-bahan yang merusak, sudah tidak ditemukan lagi setelah Coremap dilaksanakan. Salah seorang narasumber yang diwawancarai pada penelitian ini mengemukakan fenomena tersebut melalui pernyataan berikut ini.

Sekarang orang tak pakai tuba lagi nangkap ikan. Kalau dulu banyak yang pakai, seperti racun, potas itu, tapi sudah dikasih tau Coremap itu tak boleh. Tak ada lagi orang pakai tuba. ... Kalau bom memang orang sini tak biasa pakai, yang pakai bom itu orang dari luar.

Sembiring (2009) dalam tulisannya yang menjadi pemenang kedua pada *Journalist Writing Competiton* yang diselenggarakan Dinas KP2 Kota Batam mengemukakan bahwa Coremap berhasil mengubah pola tangkap nelayan tradisional. Sebelum program pengelolaan terumbu karang tersebut dilaksanakan, banyak nelayan melakukan penangkapan ikan menggunakan alat dan cara yang tidak ramah lingkungan. Saat ini aktifitas kenelayan mereka tidak lagi merusak habitat terumbu karang. Sebagian nelayan bahkan sudah melaksanakan kegiatan budidaya ikan menggunakan karamba, sehingga tidak mengancam kehidupan sumber daya laut tersebut.

Perubahan perilaku tersebut merupakan salah satu refleksi dari pemahaman yang mendalam mengenai fungsi dan manfaat terumbu karang bagi kehidupan manusia. Hal ini merupakan salah satu dampak positif dari kegiatan penyadaran masyarakat yang dilakukan Coremap. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan sebelum program berjalan juga

berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya terumbu karang karena. Dalam kegiatan sosialisasi tidak hanya diperkenalkan jenis-jenis kegiatan yang akan diselenggarakan, akan tetapi juga diberikan pengetahuan tentang manfaat terumbu karang serta perlunya upaya untuk menjaga kesinambungan hidupnya secara lestari.

Perilaku menjaga kelestarian terumbu karang diwujudkan pula dalam bentuk pengawasan terhadap aktifitas-aktifitas merusak yang dilakukan oleh pihak lain. Upaya ini dilakukan nelayan pada saat mereka turun ke laut. Jika menemukan pihak-pihak yang melakukan berbagai aktifitas yang merusak terumbu karang, nelayan berusaha mengejar pelaku. Namun sayangnya, keterbatasan kemampuan armada yang dimiliki sering kali menghambat mereka untuk mengejar pelaku dan menghalangi perbuatannya. Para pelaku pada umumnya mempunyai armada dengan kekuatan yang jauh lebih besar daripada armada milik nelayan. Menghadapi kenyataan tersebut, upaya yang dilakukan nelayan hanya melaporkan aktifitas yang ditemui kepada anggota pokmas pengawasan untuk ditindaklanjuti. Tanpa kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya kelangsungan hidup serta kelestarian terumbu karang, kegiatan pengawasan yang bersifat mandiri tersebut tidak mungkin dilakukan oleh masyarakat.

Upaya masyarakat untuk mengawasi berbagai aktifitas yang merusak terumbu karang merupakan dukungan bagi tugas pengawasan yang menjadi tanggung jawab anggota pokmas pengawasan. Tanggung jawab ini dilaksanakan melalui kegiatan patroli laut secara reguler dengan menggunakan sarana (kapal dan motornya) serta dana yang disediakan Coremap. Dalam kenyataannya, kegiatan pengawasan tidak dapat dilaksanakan secara teratur. Salah satu penyebab terhambatnya kegiatan ini adalah kurangnya dana operasional untuk keperluan patroli¹.

¹ Dana ini diperlukan untuk membeli bahan bakar dan uang jasa anggota pokmas karena pada hari patroli mereka tidak bisa melaut. Uang jasa dapat dipandang sebagai penghasilan yang diperoleh anggota pokmas pengawasan pada hari mereka melakukan kegiatan patroli. Pada saat patroli mereka tidak bisa menangkap

Keinginan masyarakat untuk melakukan pengawasan ini merupakan faktor yang positif dalam kegiatan pengelolaan terumbu karang dan sumber daya laut pada umumnya. Idealnya upaya ini dapat dipertahankan sehingga berakar dalam kehidupan masyarakat dan berlanjut pada masa-masa mendatang. Meskipun waktu pelaksanaan Coremap telah berakhir, kegiatan pengawasan tetap bisa terlaksana dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah berbagi "tugas" pengawasan di antara para nelayan, misalnya berdasarkan wilayah penangkapan. Mereka yang biasa melaut ke wilayah tertentu diberi tugas untuk menjaga wilayahnya dari kegiatan-kegiatan yang merusak.

4.3. DAMPAK KEGIATAN ATAU KEBERADAAN COREMAP TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT

Berbagai kegiatan yang dilaksanakan Coremap sejak tahun 2005 berdampak terhadap kehidupan masyarakat di Kelurahan Pulau Abang. Dampak yang muncul tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, akan tetapi juga pada kehidupan sosial masyarakat, baik yang bersifat positif maupun negatif. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan Coremap mewarnai dinamika kehidupan sosial masyarakat di kelurahan ini.

Dampak positif dapat dilihat dalam beberapa hal. Salah satu di antaranya adalah tumbuhnya pemahaman tentang perilaku hidup sehat, khususnya yang berhubungan dengan kebersihan lingkungan. Hal ini merupakan dampak positif dari kegiatan yang dilaksanakan melalui dana bantuan desa, yaitu pembuatan tempat sampah dan sarana MCK, sebagaimana yang dikemukakan pada Bab II. Selain itu, pembuatan bak juga sampah memfasilitasi praktik hidup sehat, sehingga kebiasaan

ikan, sehingga penghasilan yang mereka peroleh digantikan dengan uang jasa untuk patroli.

membuang sampah ke laut dan juga di sembarang tempat di darat dapat dikurangi.

Meskipun sangat terkait dengan aktifitas ekonomi, kehidupan sosial masyarakat yang secara perlahan mulai menunjukkan perubahan adalah kebiasaan untuk bekerja secara berkelompok. Sebelum Coremap dilaksanakan, aktifitas ekonomi masyarakat di Kelurahan Pulau Abang pada umumnya dijalankan secara individu. Kegiatan ekonomi Coremap menumbuhkan cara kerja berkelompok, melalui pokmas UEP. Pada Bab III dikemukakan bahwa salah satu hambatan dalam pelaksanaan kegiatan MPA adalah belum terbiasanya masyarakat untuk bekerja secara berkelompok. Namun, keberhasilan salah satu kelompok dalam menjalankan usaha budidaya ikan kerapu sampai panen menjadi pendorong bagi penduduk yang lain untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang sama. Setelah kelompok "Tiger Fish" di Air Saga memperoleh hasil panen, beberapa nelayan yang lain di daerah tersebut mengajukan usulan untuk melakukan budidaya ikan kerapu dan pada saat penelitian dilaksanakan usaha tersebut telah berjalan.

Terlepas dari dampak positif di atas, tidak terelakkan Coremap juga menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan sosial masyarakat. Hal ini terutama karena beberapa kegiatan, khususnya di bidang ekonomi hanya menjangkau sebagian kecil penduduk. Hanya sebagian kecil masyarakat yang bisa diakomodasi dalam pokmas-pokmas UEP. Di antara mereka yang tidak menjadi anggota pokmas kemudian timbul prasangka bahwa kegiatan Coremap hanya untuk kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Kelompok tersebut pada umumnya adalah orang-orang yang dekat dengan pengurus Coremap di lokasi, baik karena hubungan persaudaraan maupun kedekatan tempat tinggal, seperti pernyataan salah seorang narasumber pada penelitian tahun 2005 berikut, "*... yang ikut kelompok itu cuma keluarganya. Ada adiknya, anaknya, semua keluarga dia ...*". Meskipun tidak diekspresikan secara terbuka, kecurigaan tersebut berpotensi menimbulkan perpecahan di antara masyarakat. Jika keadaan tersebut terus berlanjut, maka tidak tertutup kemungkinan akan menimbulkan konflik antara

kelompok yang menjadi anggota pokmas kegiatan Coremap dengan yang bukan anggota.

Pemilihan anggota kelompok kegiatan Coremap, terutama pokmas UEP berdasarkan hubungan keluarga dan kedekatan tempat tinggal didasari pada kemudahan untuk melaksanakan kegiatan. Salah seorang anggota pokmas UEP mengemukakan bahwa lebih mudah melaksanakan kegiatan kelompok jika anggotanya adalah saudara atau tetangga dekat. Hal ini terlihat dari pernyataan berikut, "*... kalau mengatur saudara kan lebih mudah dari pada atur orang lain. Kerja sama tetangga juga lebih enak, kan dekat kalau panggil mau kerja...*". Berdasarkan pernyataan ini diketahui bahwa kemudahan dan kepraktisan menjadi pertimbangan utama dalam memilih anggota pokmas.

Pemberian bantuan modal untuk individu berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat. Selama ini "seleksi" penerima bantuan dilakukan oleh ketua LPSTK, dengan pertimbangan kemampuan dan "kemauan" mereka dalam mengembalikan pinjaman (wawancara dengan pengurus LPSTK). Meskipun pemilihan dilakukan secara obyektif berdasarkan pertimbangan tersebut, tidak tertutup kemungkinan unsur subyektifitas juga berperan. Tidak tertutup kemungkinan hal ini akan menimbulkan kecurigaan di masyarakat bahwa faktor disukai atau tidak disukai oleh pengurus LPSTK berperan dalam menentukan penerima bantuan pinjaman individu.

Dampak sosial lain yang timbul masih terkait dengan "kecemburuan" sebagian anggota masyarakat karena manfaat dari kegiatan pembangunan yang tidak merata. Hal ini antara lain akibat pembuatan tempat sampah yang mendapat bantuan dana dari Coremap. Jumlah dana yang terbatas dan harus dibagi dengan kegiatan pembangunan fisik lainnya menyebabkan jumlah tempat sampah yang dibuat hanya sedikit. Akibatnya, pembangunan tempat sampah tidak dapat dinikmati oleh seluruh penduduk Kelurahan Pulau Abang. Namun, permasalahan ini tidak berkembang menjadi besar karena bagi kebanyakan masyarakat tempat sampah bukan merupakan kebutuhan mendesak.

Sampai saat penelitian ini dilaksanakan fenomena-fenomena sosial tersebut belum muncul ke permukaan dalam bentuk pertikaian di antara masyarakat. Ada kemungkinan hal ini karena manfaat ekonomi yang dirasakan oleh anggota pokmas Coremap, khususnya pokmas UEP tidak terlalu besar. Sebagai contoh, hanya dua pokmas UEP yang sudah mencapai panen dan keuntungan yang diperoleh juga tidak besar karena kelompok harus mengembalikan sebagian modal pinjaman kepada LPSTK, di samping menyediakan modal untuk masa produksi berikutnya. Terlebih lagi jika diperhitungkan dengan waktu tunggu yang panjang, sementara masyarakat sudah terbiasa bekerja dengan memperoleh pendapatan dalam waktu singkat, keuntungan yang diperoleh dianggap relatif kecil. Oleh karena itu, kecemburuan yang muncul relatif bisa diredam. Namun demikian, masa masa mendatang, jika kegiatan-kegiatan pokmas UEP sudah mendatangkan manfaat ekonomi dalam jumlah besar, maka kemungkinan besar perasaan tersebut dapat muncul dalam bentuk ekspresi yang merusak kehidupan sosial serta kedamaian yang selama ini dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk melibatkan lebih banyak penduduk di lokasi Coremap sangat perlu dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kota Batam. 2007. *Kelurahan Galang dalam Angka 2007*. BPS Kota Batam. Batam
- BPS Provinsi Kepulauan Riau. 2009. *Berita Resmi Statistik : Profil Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau 2009*. BPS Provinsi Kepulauan Riau. Batam.
- Burke, Lauretta, Liz Selig dan Mark Spalding. 2002. "Indonesia", dalam *Reefs at Risk in Southeast Asia*. UK: Cambridge.
- Departemen Perikanan dan Kelautan, 2007. *Pedoman Umum Pengelolaan Berbasis Masyarakat. Coral Reef Rehabilitation and Management Program Phase II (COREMAP II)*. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Giyanto & Picasouw.J. 2008. *Monitoring Terumbu Karang: Kota Batam (Pulau Abang)*. COREMAP II-LIPI. Jakarta.
- <http://geo.ugm.ac.id/archives/100>. 2008. *Mengapa Terumbu Karang Harus Diselamatkan?* diakses 17 Desember 2009.
- <http://www.goblue.or.id/tentang-terumbu-karang>. *Tentang Terumbu Karang*. diakses 17 Desember 2009.
- <http://ikanmania.wordpress.com/2007/12/31/>. *Pemanfaatan Mujair Hidup untuk Efisiensi Budidaya Kerapu Sederhana di Tambak*
- <http://www.lablink.or.id/Eko/Wetland/lhbs-trmbu.htm>. *Terumbu Karang*. diakses 17 Desember 2009.
- http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=3605&Itemid=29. *Perkembangan Harga Komoditi Pokok Hingga 27 April 2009*.
- http://www.terangi.or.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=100&Itemid=1. *Faktor-faktor Yang Merusak Terumbu Karang*. diakses 17 Desember 2009.

http://www.terangi.or.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=41. *Terumbu Karang Indonesia*. diakses 17 Desember 2009.

<http://www.wri.org/publication/content/8135>. *Indonesia*. diakses 17 Desember 2009.

LPSTK Kelurahan Pulau Abang. 2007. *Rencana Pengelolaan Terumbu Karang (RPTK) Kelurahan Pulau Abang*. Coremap II Kota Batam. Batam.

PMO/NCU Coremap II, tanpa tahun *COREMAP II*. Directorate General of Marine, Coasts and Small Islands.

Project Appraisal Document. COREMAP II 2005

Romdiati, Haning dan Mita Noveria. 2007a. *Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia. Kelurahan Pulau Abang. Kecamatan Galang. Kota Batam*. Jakarta: LIPI Press.

-----, 2007b. *Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Lokasi Coremap II Kelurahan Pulau Abang Kota Batam. Hasil BME*. Laporan Penelitian CRITC LIPI.

Sembiring, Herry. 2009. *Menyelamatkan Rumah Ikan Untuk Masa Depan*.
<http://regional.coremap.or.id/batam/berita/article.php?id=956>. diakses 17 Desember 2009.

Yayasan Laksana Samudera. 2007. *Laporan Akhir Pengelolaan Berbasis Masyarakat Coremap II Kota Batam 2007*. Yayasan Laksana Samudera. Batam.

Yayasan Laksana Samudera. 2008. *Laporan Akhir Pengelolaan Berbasis Masyarakat Coremap II Kota Batam 2008*. Yayasan Laksana Samudera. Batam.

